

TESIS

PENGARUH PERTUMBUHAN ALAMI DAN MIGRASI PENDUDUK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM

Kk

TE 26/07

Zu

1



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006



TESIS

PENGARUH PERTUMBUHAN ALAMI DAN MIGRASI PENDUDUK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM



ZULKIFLI
NIM. 090010157 L

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**PENGARUH PERTUMBUHAN ALAMI
DAN MIGRASI PENDUDUK TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KOTA BATAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Kelulusan Pada Program Pasca Sarjana
Universitas Airlangga



oleh :
ZULKIFLI
NIM. 090010157 L

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

MATERI PROPOSAL TESIS INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL2005

OLEH

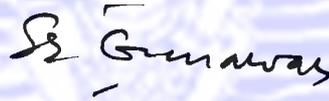
PEMBIMBING



PROF.DR.H.UMAR NIMRAN.MA

NIP. 130531862

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN
PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA



DR. SRI GUNAWAN, M.COM

NIP . 131653420

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan tesis ini sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

Kota Batam yang sangat terkenal dengan daerah industri dan alih kapalnya sebagai roda penggerak perekonomian daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura membuat daerah ini menjadi tumpuan harapan sebagian warga luar Kota Batam dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Akan tetapi kedatangan penduduk tersebut membuat permasalahan baru yang mempengaruhi pendapatn masyarakat Kota Batam. Untuk mengetahui dan menganalisis hal tersebut penulis untuk meneliti hubungan ketiga variabel diatas untuk dapat dijadikan sebagai salah satu temuan dalam memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan tentang kebijakan kependudukan di daerah ini. Untuk menindaklanjuti keinginan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan judul mengangkat Penelitian ini berjudul **"Pengaruh Pertumbuhan Alami dan Migrasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Batam."**

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas pengetahuan, pengarahan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan kepada kami selama mengikuti Program Pasca Sarjana di Universitas Airlangga. Secara khusus diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Umar Nimran, MA. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan tesis ini.
2. Bapak DR. Sri Gunawan, M. Com., DBA, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Unair.

3. Bapak Walikota Batam, Drs H. Nyat Kadir yang telah memberikan kesempatan dalam melaksanakan studi ini dan dorongan moril selama Penulis melaksanakan pendidikan pada Universitas Airlangga.
4. Bapak Prof. DR. H. Suroso Imam Zadjuli, SE yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Secara khusus kepada istri dan keluarga tercinta yang dengan tulus ikhlas mendukung Penulis sepenuhnya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan tesis ini.
6. Para staf dan pegawai dalam jajaran Pemerintahan Kota Batam yang telah memberikan bantuan, baik berupa data, kepustakaan dan hal lain yang tidak ternilai harganya.
7. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil kepada Penulis.

Secara akademis, hasil penelitian ini secara ikhlas dipersembahkan dan diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan keselarasan, keserasian serta keseimbangan antara pertumbuhan Alami, migrasi dengan pendapatan masyarakat untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

Bak kata pepatah "*Tak ada Gading Yang Tak Retak*" demikian pulalah Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum sempurna. Dengan rendah hati penulis terbuka untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga hasil tulisan ini, bermanfaat untuk kemajuan dunia pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Batam, Maret 2005

Penulis

RINGKASAN

PENGARUH PERTUMBUHAN ALAMI DAN MIGRASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM

Oleh : Z u l k i f l i

Sebagai konsekuensi logis dari pelimpahan yang besar pasca pemberlakuan era otonomi daerah ini, seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Batam mempunyai tantangan yang besar mulai dari pemilihan kebijakan yang harus ditempuh, memenuhi besarnya tuntutan masyarakat untuk melakukan *clean government and good governance*, peningkatan pelayanan masyarakat (*public services*) hingga sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di era reformasi seperti saat ini, masyarakat tidak sebatas menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tetapi juga menuntut yang lebih besar lagi, yakni ingin dilibatkan mulai dari awal menyusun rencana pembangunan, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pembangunan hingga bersama-sama mengawasi jalannya pembangunan.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh jajaran Pemerintah Kota Batam dalam kaitannya dengan pengendalian mobilitas kependudukan mengisyaratkan perlu adanya kerja keras dan upaya maksimal, yang pada satu sisi harus mampu menyediakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perusahaan yang menanamkan modalnya di Batam, sementara di sisi lain arus migrasi tersebut hendaknya dapat menekan tenaga kerja non-produktif untuk masuk ke wilayah ini.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; 1) Apakah pertumbuhan alami mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat di Kota Batam ? ; 2) Apakah migrasi mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat di Kota Batam?

Karakteristik penduduk yang selalu berubah merupakan satu fenomena yang dinamis dalam suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan alami penduduk suatu wilayah merupakan suatu fenomena dinamis dimaksud. Pertumbuhan alami secara umum dihitung dari selisih antara kuantitas penduduk yang lahir (*fertilitas*) dengan kuantitas penduduk yang mati (*mortalitas*). Sementara persentase pertumbuhan alami di Kota Batam dapat diprediksi dari jumlah penduduk yang lahir dikurangi dengan jumlah penduduk yang mati terhadap jumlah penduduk awal pada tahun berjalan.

Pertumbuhan penduduk alami di Kota Batam sangat kecil jumlahnya mengingat persentasi potensi masa usia subur penduduk Kota Batam sangat dominan yang bekerja di sektor industri manufaktur dan alih kapal di kawasan industri yang ada di Kota Batam. Pertumbuhan penduduk melalui migrasi merupakan kondisi mobilitas penduduk suatu wilayah berdasarkan selisih antara penduduk yang masuk (*Imigrasi*) ke Kota Batam dengan penduduk yang keluar

(Emigrasi) dari Kota Batam. Angka pertumbuhan penduduk Kota Batam pada beberapa tahun terakhir sangat didominasi oleh angka migrasi yang sangat tinggi di Kota Batam. Hal ini sangat didukung oleh posisi wilayah Kota Batam yang strategis dalam mendapatkan pekerjaan dan perekonomian yang lebih baik. Sehingga pertumbuhan penduduk berdasarkan angka migrasi di Kota Batam sangat dominan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan dipengaruhi oleh angka pertumbuhan migrasi tersebut. Kesejahteraan masyarakat Kota Batam dapat dihitung dengan menggunakan indeks kebutuhan minimum Kota Batam. Pencapaian angka indeks kebutuhan minimum tersebut dapat dijadikan besarnya Kesejahteraan masyarakat di Kota Batam. Selain itu untuk membandingkan Kesejahteraan perkapita Kota Batam dapat dibandingkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk Kota Batam pada tahun berjalan sehingga Kesejahteraan riil penduduk Kota Batam dapat dipengaruhi pertumbuhan penduduk di Kota Batam.

Dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji kebenarannya sebagai berikut ; 1) Pertumbuhan penduduk alami secara signifikan mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat Kota Batam; 2) Migrasi penduduk secara signifikan mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat Kota Batam.

Setelah melihat pengaruh yang dibuktikan dengan uji statistik tersebut diatas maka disarankan berbagai hal sebagai berikut : 1) Pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh penyediaan lapangan kerja bagi mereka mampu menunjang kenaikan Kesejahteraan masyarakat sehingga perlu keterpaduan program pengendalian penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja di Kota Batam; 2) Pertumbuhan penduduk juga sepatutnya diimbangi oleh pertumbuhan investasi yang mampu memberikan multiplier efek terhadap upaya peningkatan penghasilan penduduk migrasi yang jumlahnya sangat tinggi di Kota Batam.

Kedua hipotesis tersebut di atas telah dibuktikan melalui analisis regresi linier sehingga penelitian ini menyimpulkan adanya pengaruh pertumbuhan alami dan migrasi penduduk Kota Batam terhadap Kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

SUMMARY
**The Naturally Growth and Migration Influenced to Residents Welfare
in Batam Cities.**

By : Zulkifli

As a logical consequence of the big overflows pasca autonomous era application in this area, entire overall Governmental bodies of Batam Cities have big challenge start from election of policy which must be gone through, fulfilling the level of society demand to conduct good governance and clean government, make-up of public services till transparent governance system and accountable. In reform era nowadays, society not only claims of good governance management, but also claim larger ones again, namely wish to be entangled to start from early compiling development plan, involve active in management of development till together observe the way development. Problems complexity faced by overall Government of Batam Cities in the bearing of with operation of mobility isn't it sign needed the existence of hard work and maximal effort, which is on one side have to can provide labor having membership as according to company demand and requirement inculcating the capital in Batam, whereas on the other side the migration current shall earn to depress labor of non-productive to step into this region. As for this research internal issue formula is 1) Do natural growth influence earnings of society in Batam Cities 2) Do migration influence earnings of society in Batam Cities?

Characteristic of residents which always change is one dynamic phenomenon in selected region. Natural growth of resident in Batam region is such dynamic phenomenon. Natural growth is in general reckoned from difference between resident amount which born (fertility) till dead resident amount (mortality). Whereas percentage of natural growth in Batam Cities earn predicted of residents amount which born to be lessened with dead residents amount to residents amount early in one year going on.

The natural growth of resident in Batam Cities are very small considering amount of percentages of potency a period of fertile age of Batam resident that dominant industrial manufacture sector labor and displace ship in industrial area in Batam Cities. Growth migration of resident are through the condition of resident mobility region pursuant to difference among resident which entry (imigration) to Batam Cities with secretary resident (Emigration) of Batam Cities. Number of Batam residents growth some the last years very predominate in high migration number in Batam Cities. This matter very support by regional position this town the strategic in getting economical and work of well. So that growth of resident pursuant to migration number in Batam Cities is very dominant so that mount prosperity of society also will influence by number growth of migration. Earnings of urban community of Batam can be counted by using index requirement of Town minimum of Batam. Attainment of index number requirement of the minimum can be made by earnings of society level in Batam Cities. Besides it, to compare earnings of percapita of Batam Cities can be compared to Regional

Abstract

The Local Government of Batam Cities have been opening stand up pursuant Law Number 53, 1999's initially only as administrative town have to can develop the region of and potency which was him owning, to fulfill requirement of development and improvement of prosperity for Batam Cities which until moment have the amount of residents which have reached 596,339 person.

The big economic potency and strategic value in this area in national economy and international played, Government of Batam Cities given on to big challenge beside existing opportunity to move forward this region.

Complexity Problems faced by overall Government of Batam Cities in the bearing of with operation of mobility isn't it sign needed the existence of hard work and maximal effort, which is on one side have to can provide labor having membership as according to company demand and requirement inculcating the capital of Batam City, whereas on the other side the migration current shall earn to depress labor of non-productive to step into this region. The current of communications and globalization era position the overall Batam Governmental bureaucrat of Batam City become and signpost of problem solver so that ready problems of labor and at the same time the problem of isn't it can overcome. In general problem estuary it is concerning Human Resource. Research with title "THE NATURAL GROWTH AND MIGRATION RESIDENT INFLUENCED TO SOCIETY WELFARE IN BATAM CITIES"

Conducted by resident literate can be interpreted as each Indonesia citizen is later on shortened by Indonesian citizens and foreign citizen is later on shortened by]foreigners owner of permit remain to Indonesia state region (The Local Laws Number 2, 2001's). Birth, Death and Migration are three component to influence change of residents amount. An area will experience

of the change in to the number of area will experience of the change in to the number of resulted residents because the resident born, death, and moving. As long as history, earthling increase phlegmatically and newly then in 20 centuries start to growing fast. Pursuant to above description hence we will conduct research by 1. The natural growth of resident by isn't it influence earnings of urban community of Batam 2. Migration Resident by isn't it influence earnings of urban community of Batam.

Entire gathered data here in after will be processed and analyzed by using descriptive method and Analyze Linear Regression method. Where analyze is more emphasize at relation between third variable directly data in selected range of time. For quantitative descriptive analysis, used to see level earnings of related to society is natural growth and migration isn't it. quantitatively, hence data will be submitted by using aid of it is tables of resident graphic. The growth followed by ready employment for them can support increase of earnings of society so that need integrity of operation program resident with availability of employment in Batam Cities. Growth of resident also is deservedly made balance to growth of investment capable to give effect multiplier effort of make-up of production of migration resident which amount of very high in Batam Cities.

Keywords : The Naturally Growth, Migration and people Earnings.

DAFTAR ISI**Halaman**

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia	v
Ucapan Terima kasih	vi
Ringkasan	viii
Summary	x
Abstract	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Definisi Penduduk	9
2.2. Pertumbuhan Alami	12
2.3. Definisi Migrasi	13
2.4. Definisi Pendapatan Masyarakat	13
2.5. Definisi Otonomi Daerah	14
2.6. Penerapan Perdaduk dalam konteks Otonomi Daerah	16
III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1. Kerangka Proses Berpikir	22
3.2. Kerangka Konseptual	23
3.3. Hipotesis Penelitian	24
IV. METODE PENELITIAN	
4.1. Jenis Penelitian	25
4.2. Populasi, Sampel, Besaran Sampel (Sample Size), Dan Prosedur Penarikan Sampel	22
4.3. Identifikasi Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	23

4.3.1. Identifikasi Variabel Penelitian	23
4.3.2. Definisi Operasional	24
4.4. Instrumen Penelitian	25
4.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	26
4.6. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
4.7. Analisa Data	28
4.8. Pengujian Hipotesis	30

V. ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Gambaran Umum Kota Batam.....	32
5.1. Profil Wilayah Kota Batam	32
5.1.1 Pembentukan Kota Batam	32
5.1.2. Badan Otorita Batam	33
5.1.3. Barelang (Batam- Rempang – Galang)	35
5.2. Otonomi daerah	36
5.3. Keadaan Geografis	37
5.3.1. Letak, Batas dan Luas	38
5.3.2. Fisiografi	38
5.3.3. Wilayah Administrasi	39
5.3.4. Demografi	40
5.4. Eksistensi Investasi, sarana dan prasarana penunjang Investasi	40
5.5. Data Penelitian	45
5.5.1. Jumlah Penduduk Kota Batam	45
5.5.2. Pendapatan Asli Daerah	46
5.5.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	49
5.5.4. Pendapatan Perkapita Kota Batam	52
5.5.5. Deskripsi Perkembangan Investasi	54
5.6. Analisis Data Penelitian	62

VI. PEMBAHASAN

6.1. Dampak Pertumbuhan Alami terhadap pendapatan masyarakat Kota Batam	62
6.2. Pendapatan Masyarakat dipengaruhi pertumbuhan Migrasi.....	64
6.3. Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap pendapatan penduduk	65

VII. PENUTUP

7.1. Kesimpulan	67
7.2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
--------------------------------	----



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk Kota Batam	3
Tabel 4.1	Definisi Operasional	28
Tabel 3.1	Analisis SWOT Terhadap Kondisi Internal	32
Tabel 3.2	Analisis SWOT Terhadap Kondisi Eksternal	33
Tabel 3.3	Analisis SWOT Terhadap Isu Strategis	34
Tabel 5.1	Perkembangan Jumlah Wisman ke Batam	41
Tabel 5.2	Fasilitas Penunjang Investasi dan Infrastruktur	43
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Kota Batam Th 1978 – 2004	46
Tabel 5.4	Realisasi Penerimaan Daerah Kota Batam	47
Tabel 5.5	Penerimaan APBD Kota Batam 2001 – 2004	49
Tabel 5.6	PDRB Per Kapita Kota Batam	53
Tabel 5.7	Perbandingan Penerimaan terhadap PDRB Batam	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Proses Berpikir	22
Gambar 3.2. Kerangka Konseptual	23



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah membawa dampak dan implikasi yang cukup signifikan di seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Dampak tersebut antara lain berupa pelimpahan sebagian besar kewenangan kepada daerah baik dalam bidang pengaturan keuangan daerah maupun kesempatan yang cukup luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan memodifikasi daerahnya sendiri.

Keputusan tentang sumber penerimaan dan alokasi pembiayaan daerah yang sebelumnya diatur dan ditentukan pemerintah pusat, kini dilakukan pemerintah daerah yang diikuti dengan kewenangan yang dimilikinya. Jajaran aparat pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengambil berbagai inisiatif dan kebijakan yang menyangkut pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

Pertumbuhan pesat yang terjadi di Kota Batam seperti sektor penanaman modal swasta asing dan nasional lebih dari US\$ 5,1 Milyar pada tahun 1999-2003 dengan menyediakan lebih dari 140.000 lapangan kerja sektor formal dan sekitar 8000 usaha kecil dan menengah pada sektor informal. Nilai ekspor mencapai US\$ 4,7 milyar, ditambah devisa dari sektor



pariwisata sebesar US\$ 445 Juta dari kehadiran 1,1 Juta wisatawan di Kota Batam pada tahun yang sama. Seluruh kegiatan ekonomi menghasilkan kesejahteraan daerah sebesar Rp 46 milyar dengan setoran pajak ke pemerintah pusat sebesar Rp 874 milyar. Sekalipun tidak ada pungutan PPN, PPnBM dan BM di Batam, namun pajak perkapita di Batam mencapai jumlah Rp 2.759.801,- atau sebesar 6,7 kali pajak perkapita nasional (tidak termasuk migas), yang hanya Rp 411.558,-. Pada akhir 1998, dengan PDRB sekitar 5,4 triliun rupiah, tingkat kepatuhan membayar pajak di Batam yang tergambar dari *tax-ratio* 13,26 % , yang hampir 2 kali besar *tax-ratio* nasional yang hanya 7,7 % pada tahun yang sama.

Pemerintah Kota Batam yang resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah/Kota Baru di Provinsi Riau juga tidak terlepas dari persoalan yang muncul sebagai konsekuensi pemberlakuan otonomi daerah. Kota Batam yang semula hanya sebagai kota administratif harus mampu mengembangkan wilayahnya dan potensi yang dimilikinya, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi warga Kota Batam yang sampai saat ini telah mencapai 596,339 jiwa, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 Pertumbuhan Penduduk Batam tahun 1978 sampai dengan bulan Nopember tahun 2004.

Tabel : 1.1
JUMLAH PENDUDUK KOTA BATAM TAHUN 1978 – Nopember 2004 (JIWA)

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Setahun
1978	31.800	-
1983	43.000	6,22
1988	79.400	13,05
1989	90.500	13,98
1990	95.800	5,86
1991	107.600	12,32
1992	123.000	14,31
1993	146.214	18,87
1994	162.477	11,12
1995	196.080	20,68
1996	247.588	26,27
1997	254.745	2,89
1998	266.428	4,59
1999	358.700	34,63
2000	462.528	28,95
2001	527.151	21,37
2002	549.951	4,32
2003	562.661	2,19
2004	596.339	5,38

Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam

Sebagai konsekuensi logis dari pelimpahan yang besar pasca pemberlakuan era otonomi daerah ini, seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Batam mempunyai tantangan yang besar mulai dari pemilihan kebijakan yang harus ditempuh, memenuhi besarnya tuntutan masyarakat untuk melakukan *clean government and good governance*, peningkatan pelayanan masyarakat (*public services*) hingga sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di era reformasi seperti saat ini, masyarakat tidak sebatas menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tetapi juga menuntut

yang lebih besar lagi, yakni ingin dilibatkan mulai dari awal menyusun rencana pembangunan, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pembangunan hingga bersama-sama mengawasi jalannya pembangunan.

Di sisi lain tantangan Pemerintah Kota Batam dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan juga semakin kompleks. Dengan karakter Kota Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional serta statusnya sebagai pintu gerbang pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN atau dikenal dengan *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)*, tugas aparat pemerintah atau birokrasi pemerintah semakin berat.

Dalam perkembangannya Kota Batam menunjukkan prestasi yang sangat prestisius dalam bidang ekonomi seperti yang terlihat dari angka pertumbuhan ekonomi sekitar 7,8 persen per tahun, membuat daerah ini memiliki kemajuan lebih pesat di banding daerah lain. Demikian juga dengan jumlah perusahaan asing yang saat ini mencapai 531 buah perusahaan asing yang beroperasi di berbagai kawasan industri di Kota Batam di samping PMDN yang juga terus mengalami peningkatan. Hal ini menyiratkan adanya sebuah tantangan besar untuk mengelola dan mengembangkannya selain merupakan sebuah kesempatan yang besar.

Pemerintah Kota Batam sebagai institusi yang mempunyai legalitas formal dalam mengembangkan Kota Batam harus memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga kerja yang ahli dan dibutuhkan oleh perusahaan-

perusahaan yang ada di Kota Batam. Dalam upaya penyediaan tenaga kerja di maksud perlu adanya tindakan selektif dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Batam tentang Kependudukan. Dalam produk hukum yang berskala regional Kota Batam dan berimplikasi secara nasional terhadap mobilitas penduduk dimuat aturan dan syarat-syarat mutlak bagi penduduk yang akan tinggal dan menetap di Kota Batam.

Sejak diterapkannya Peraturan Daerah tentang Kependudukan (Perdaduk) sebagai persyaratan masuk ke pulau ini, ketegasan aparat Perdaduk di counter-counter pelabuhan kedatangan dan pintu masuk ke Kota Batam sangat mempengaruhi arus migrasi yang masuk ke Kota Batam di mana persentase penurunan arus migrasi dimaksud antara 1,3 – 2,5 persen. Dampak dari kebijakan tersebut menimbulkan sentimen negatif bagi elemen masyarakat yang belum memenuhi persyaratan dan memunculkan harapan positif bagi elemen masyarakat yang menyadari perlunya pembatasan arus migrasi ke daerah yang sudah mencapai jumlah penduduk sekitar 583 ribu jiwa ini, demi baiknya kualitas strata kehidupan sosial di pulau ini

Dengan potensi ekonomi yang besar serta nilai strategis pulau ini dalam percaturan perekonomian nasional dan internasional, Pemerintah Kota Batam dihadapkan pada tantangan yang besar di samping peluang yang ada untuk memajukan wilayah ini.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh jajaran Pemerintah Kota Batam dalam kaitannya dengan pengendalian mobilitas kependudukan mengisyaratkan perlu adanya kerja keras dan upaya maksimal, yang pada satu sisi harus mampu menyediakan tenaga kerja yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perusahaan yang menanamkan modalnya di Batam, sementara di sisi lain arus migrasi tersebut hendaknya dapat menekan tenaga kerja non-produktif untuk masuk ke wilayah ini. Derasnya arus komunikasi dan era globalisasi memposisikan jajaran birokrat Pemerintah Kota Batam menjadi penunjuk arah dan *problem solver* sehingga permasalahan penyediaan tenaga kerja dan sekaligus masalah kependudukan dapat diatasi. Secara umum muara persoalan tersebut adalah menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) atau *human resources*.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, maka penelitian dengan judul " PENGARUH PERTUMBUHAN ALAMI DAN MIGRASI PENDUDUK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BATAM" dilakukan

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan alami mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota Batam ?
2. Apakah migrasi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kota Batam?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dengan mencermati berbagai persoalan yang dihadapi dalam konteks pembatasan mobilitas penduduk dan penyaluran tenaga kerja di Kota Batam, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk alami terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.
2. Menganalisis pengaruh migrasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan sangat bermanfaat bagi suatu instansi, masyarakat maupun bagi kalangan akademisi untuk dapat dijadikan suatu pembandingan ataupun tolok ukur dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian dimaksud.

Adapun manfaat penelitian ini untuk Pemerintah Kota Batam adalah berupa hasil kajian tentang penerapan Peraturan Daerah Kependudukan Kota Batam yang mempunyai akses langsung terhadap penyediaan tenaga kerja baik sektor formal maupun informal serta membatasi kuantitas penduduk yang tidak berkompentensi untuk datang dan tinggal di kawasan perdagangan bebas ini nantinya. Sementara itu untuk kalangan akademisi penelitian ini bermanfaat untuk menjadi suatu bahan kajian bandingan dalam membatasi mobilitas penduduk di Indonesia. Untuk masyarakat Kota Batam khususnya

dan Indonesia umumnya penelitian ini bermanfaat untuk membantu masyarakat dalam pembekalan kapasitas diri dan kemampuan personal dalam mengisi kesempatan bekerja di kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata serta sektor lainnya yang ada di Kota Batam.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Penduduk

Penduduk secara harfiah dapat diartikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan warga negara asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia (Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2001).

Kelahiran, Kematian dan Migrasi merupakan tiga komponen yang akan mempengaruhi perubahan jumlah penduduk. Suatu daerah akan mengalami perubahan dalam banyaknya penduduk yang diakibatkan karena penduduk tersebut lahir, mati, maupun pindah. Sepanjang sejarah, penduduk dunia bertambah dengan lambat dan baru kemudian di abad ke 20 mulai bertambah pesat. Untuk itu dapat dilihat pada rumus penghitungan perubahan penduduk dari tahun ke tahun, yaitu dengan persamaan berimbang.

Dalam hal ini kebijakan Perdaduk yang telah diberlakukan sejak Tahun 2002 secara serentak di seluruh pintu-pintu masuk pelabuhan di Kota Batam yang secara komprehensif bertujuan untuk melakukan seleksi dan pengawasan terhadap para pendatang yang ingin tinggal dan mencari pekerjaan di Kota Batam. Dalam dua tahun terakhir dapat diamati perbedaan yang sangat mendasar dalam hal stratifikasi penduduk musiman atau

pendatang yang masuk melalui counter-counter pelabuhan di Kota Batam. Perbedaan di maksud dapat dilihat dengan diterapkannya Perdaduk di Kota Batam segala bentuk pencari kerja yang tidak mempunyai kesempatan atau keahlian (*unskilled labour*) dalam mendapatkan pekerjaan masuk dan tinggal di Batam sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial yang baru di Kota Batam sedangkan setelah diterapkannya kebijakan tersebut maka secara psikologis dan rasional para pencari kerja tersebut telah mempersiapkan diri untuk dapat tinggal dan bekerja yang layak di Kota Batam.

Secara teoritis, merujuk pada *Edgeworth Box diagram of Pareto Efficiency*, kondisi tersebut dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan tingkat kesejahteraan yang ada. Disadari atau tidak, telah terjadi transformasi dari nasionalisasi ke regionalisasi, dan kemudian kearah globalisasi. Namun perubahan tersebut membutuhkan 'harga' yang dapat kita lihat di antaranya adalah : krisis sistem moneter internasional, dan nasional, krisis hutang luar negeri, krisis minyak dan komoditas primer lainnya, terjadinya 'crash' di pasar modal internasional pada tahun 1987, bubarnya Uni Sovyet yang diikuti dengan kecenderungan menuju *free market socialism*.

Gelombang globalisasi yang menghantam aktivitas ekonomi di atas, setidaknya memiliki tiga dimensi. *Pertama*, globalisasi telah menyebabkan pergerakan dan mobilitas semakin tidak memiliki batas dan lebih

berdasarkan perhitungan rasional ekonomis, yang di tandai dengan persaingan negara-negara berkembang untuk berlomba-lomba merebut modal asing yang berwujud investasi langsung, investasi *portfolio*, *offshore-loan*, *licensing*, maupun *franchising*. *Kedua*, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional (TNC) keseluruh penjuru dunia. Didorong oleh keuntungan global, memperoleh suplai bahan mentah, melayani pasar secara langsung, meminimumkan biaya, dan mengikuti tahap evolutif dalam internasionalisasi bisnis dan banyak terobosan-terobosan baru yang akhirnya bertujuan untuk memperkecil batas dari suatu negara dengan negara lainnya. *Ketiga*, Terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global yang memunculkan tiga *megamarkets economy* dunia yaitu, Uni Eropa, Amerika Utara dan Asia Timur dan Tenggara. Tiga kawasan ini mendominasi produksi dan perdagangan global dengan menghasilkan 70 persen ekspor dunia dan 62 persen produk manufaktur dunia, sekaligus sebagai sumber dan penerima investasi internasional.

Dengan batas waktu sampai tahun 2020 sebagai era perdagangan dan investasi bebas bagi negara berkembang, bagaimana implikasi batas waktu tersebut bagi perekonomian Indonesia, dunia usaha dan birokrasi sebagai aktor utama dalam era baru tersebut.

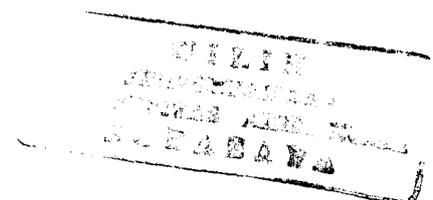
2.2. Pertumbuhan Alami

Karakteristik penduduk yang selalu berubah merupakan satu fenomena yang dinamis dalam suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan alami penduduk suatu wilayah merupakan suatu fenomena dinamis dimaksud. Pertumbuhan alami secara umum dihitung dari selisih antara kuantitas penduduk yang lahir (fertilitas) dengan kuantitas penduduk yang mati (mortalitas). Sementara persentase pertumbuhan alami di Kota Batam dapat diprediksi dari jumlah penduduk yang lahir dikurangi dengan jumlah penduduk yang mati terhadap jumlah penduduk awal pada tahun berjalan.

Pertumbuhan penduduk alami di Kota Batam sangat kecil jumlahnya mengingat persentase potensi masa usia subur penduduk Kota Batam sangat dominan yang bekerja di sektor industri manufaktur dan alih kapal di kawasan industri yang ada di Kota Batam.

2.3. Definisi Migrasi

Pertumbuhan penduduk melalui migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik melewati batas politis negara maupun batas administrasi dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap di tempat tujuan tersebut. Untuk mencari jumlah migrasi di wilayah tertentu dapat dihitung dengan membagi banyaknya migran yang masuk terhadap jumlah penduduk daerah tersebut. Untuk Kota Batam berdasarkan



selisih antara penduduk yang masuk (Imigrasi) ke Kota Batam dengan penduduk yang keluar (Emigrasi) dari Kota Batam. Angka pertumbuhan penduduk Kota Batam pada beberapa tahun terakhir sangat didominasi oleh angka migrasi yang sangat tinggi di Kota Batam. Hal ini sangat didukung oleh posisi wilayah Kota Batam yang strategis dalam mendapatkan pekerjaan dan perekonomian yang lebih baik. Sehingga pertumbuhan penduduk berdasarkan angka migrasi di Kota Batam sangat dominan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan dipengaruhi oleh angka pertumbuhan migrasi tersebut.

2.4. Definisi Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat Kota Batam dapat dihitung dengan menggunakan Indeks kebutuhan minimum Kota Batam. Pencapaian angka indeks kebutuhan minimum tersebut dapat dijadikan besarnya kesejahteraan masyarakat di Kota Batam. Selain itu untuk membandingkan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan indikator kesejahteraan perkapita Kota Batam dapat dibandingkan dengan Kesejahteraan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah penduduk Kota Batam pada tahun berjalan sehingga kesejahteraan riil penduduk Kota Batam dapat dipengaruhi pertumbuhan penduduk di Kota Batam.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Batam maka dapat digunakan indikator kesehatan dan tingkat pendidikan

masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini data kesehatan masyarakat disajikan berdasarkan angka kematian bayi, ibu pesakitan dan fasilitas kesehatan yang digunakan serta perbandingan rata-rata jumlah tenaga kesehatan per 100.000 penduduk.

2.5. Definisi Otonomi Daerah

Desentralisasi yang diamini oleh masyarakat reformasi sebagai upaya demokratisasi dalam sistem birokrasi pemerintahan di Indonesia saat ini sudah mencapai aspek realisasi sehingga perlu ada kajian teoritis yang meyangkut konsep desentralisasi dalam hal ini Otonomi Daerah di Kabupaten/Kota. Konsep desentralisasi yang ditawarkan bertujuan untuk percepatan perwujudan pelayanan masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi nasional dengan komitmen dalam pelaksanaan *good governance*. Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam konsep yang sebelumnya dapat diungkap dan sekaligus memberikan solusi dalam kajian teoritis dimaksud.

Tuntutan akan pelaksanaan desentralisasi sistem Pemerintahan di Indonesia dengan pemberdayaan Pemerintahan Daerah, secara perlahan sudah menjadi agenda demokratisasi dalam skala global termasuk didalamnya desentralisasi politik dan pemberdayaan masyarakat daerah. Secara teoritik Teune bahkan mengatakan bahwa demokratisasi hanya akan akurat tercapai bila itu diartikan sebagai pemberdayaan lembaga-lembaga

negara agar sesuai dengan fungsinya. Dalam perspektif itu, maka problem Pemerintahan Daerah adalah salah satu kajian dalam pembenahan di tingkat lembaga, sebagai bagian dari implementasi pembenahan relasi antara negara dan rakyat.

Berkaitan dengan konteks pembenahan lembaga-lembaga tersebut, David Osborne dan Ted Gaebler (1999 : 116) telah menggagas suatu konsep tentang pelaksanaan pemerintahan yang mampu menjawab tantangan modernisasi dan perkembangan tuntutan masyarakat dalam *Reinventing Government*, yang dilanjutkan dengan konsep *Banishing Bureaucracy*. Gagasan terakhir ini merupakan suatu metodologi tentang penggunaan strategi perubahan yang mendasar pada seluruh level organisasi pemerintahan. Strategi tersebut terdiri dari 5 (lima) aspek penting, yaitu yang menyangkut tujuan, insentif, akuntabilitas, kekuasaan dan kultur. Osborne dan Plastrik selanjutnya menjabarkan kelima aspek tersebut ke dalam 5 langkah strategi, yaitu : *Pertama, Core Strategy*, yaitu yang menjadi tujuan organisasi sebagai tuas pengungkit dengan menggunakan strategi kejelasan tujuan, kejelasan peran dan kejelasan pembinaan; *Kedua, Consequence Strategy*, yaitu suatu perhitungan sebab dan akibat positif dengan mengerahkan perhatian kepada daya dan ragam insentif sebagai tuas, dengan menggunakan bibit-bibit keunggulan kompetitif dan manajemen kinerja; *Ketiga, Customer Strategy*, yang pada dasarnya melihat tanggung

jawab sebagai kekuatan pendobrak, sedangkan pendekatannya adalah *customer choice approach*, pendekatan pemilihan keunggulan kompetitif dan pendekatan jaminan pelayanan mutu kerja, serta pemberdayaan masyarakat; *Keempat, Control Strategy*, yang melihat kekuasaan sebagai tuas pendobrak perubahan dengan pendekatan organisasi, pemberdayaan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat; *Kelima, Culture Strategy*, yang menentukan budaya sebagai kekuatan pendobrak. Pendekatan yang dipakai adalah metode-metode yang menyentuh pada dasar lensa konseptual (*conceptual lens*) seseorang, dan pendekatan pengembangan pola mental yang baru (*winning minds*).

Upaya pembenahan pada level negara tersebut, saat ini memang telah menjadi wacana yang komprehensif dan universal. Tetapi kemudian kita dapat melihat bahwa wacana semacam itu sifatnya masih sangat *managerialist*. Dimana hal tersebut kurang memiliki nuansa yang lebih bersifat politis, padahal dalam membicarakan kinerja pemerintah dalam konteks hubungannya dengan masyarakat, nuansa politik harus lebih mendominasi dan berperan aktif. Untuk itu, beberapa pakar kemudian menggagas konsep tentang Desentralisasi Politik atau Devolusi.

2.3. Penerapan Perdaduk dalam konteks Otonomi Daerah

Secara konseptual, Devolusi sudah mulai dikenal kurang lebih dua dekade yang lalu. Menurut Fadillah Putra (2000 : 34), Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) pada Tahun 1962 mengartikan Desentralisasi kedalam 2 (dua) pengertian utama, yaitu :

1. Dekonsentrasi, yang disebut juga sebagai Desentralisasi Administrasi;
2. Devolusi, yang sering juga disebut sebagai Desentralisasi Politik, yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Dengan demikian, Devolusi adalah kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk mandiri dan independen, di mana Pemerintah Pusat harus melepaskan fungsi-fungsi tertentu untuk menciptakan unit-unit Pemerintahan Daerah yang otonom dan berada di luar kontrol langsung Pemerintah Pusat. Dalam penelitian ini contoh kasus yang aktual adalah pemberlakuan perdaduk sebagai suatu kemandirian Pemerintah Kota Batam dalam mengelola kebijakan suplai tenaga kerja dari luar Batam untuk tinggal dan bekerja di Pulau Batam dengan ketentuan dan prosedural yang terukur. Kebijakan dimaksud berada di luar kontrol Pemerintah Pusat akan tetapi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya di tingkat Pemerintah Pusat.

Dalam kerangka ini, dapat diperkenalkan beberapa ciri khusus Devolusi sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Lokal harus diberi otonomi dan kebebasan, serta dianggap sebagai level terpisah yang mana tidak memperoleh kontrol langsung dari Pemerintah Pusat;
- 2) Unit-unit lokal harus memiliki batas-batas geografis yang ditetapkan secara hukum, dan jelas dimana mereka menerapkan wewenangnya serta melaksanakan fungsi-fungsi publiknya;
- 3) Pemerintah Lokal harus diberi status lembaga dan wewenang untuk meningkatkan sumber-sumber guna melaksanakan fungsi-fungsi khusus;
- 4) Devolusi mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan Pemerintah Lokal sebagai lembaga, di mana lembaga ini dianggap oleh penduduk lokal sebagai organisasi yang menyediakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhannya, dan sebagai unit-unit pemerintah yang memiliki pengaruh;
- 5) Devolusi merupakan suatu rancangan dimana terdapat hubungan saling menguntungkan antara Pemerintah Lokal dan Pemerintah Pusat, yaitu dimana Pemerintah Lokal memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi dengan unit-unit yang lain dalam sistem pemerintahan yang merupakan bagiannya.

Dalam perspektif yang sama, Sherwood (1998 :37) menyatakan bahwa Devolusi berarti peralihan kekuatan ke unit-unit geografis Pemerintah

Lokal yang terletak di luar struktur komando formal Pemerintah Pusat. Jadi, Devolusi menggambarkan konsep-konsep pemisahan dari berbagai struktur dalam sistem politik secara keseluruhan. Demikian halnya dengan pengaturan mobilitas penduduk di Kota Batam yang tidak dapat diintervensi Pemerintah Pusat karena kebijakan tersebut menyangkut eksistensi Pemerintah Kota Batam dalam mengelola warganya dan sekaligus membatasi jumlah pendatang yang tidak terkontrol (*uncontrolled comers*) yang akan mempengaruhi tingkat stabilitas keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di pulau ini.

Devolusi juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk lebih mendekatkan pembangunan kepada rakyat yang lebih mengetahui situasi dan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, Goldberg (2000 : 121) mengemukakan 5 (lima) prasyarat agar tujuan tersebut dapat terimplementasikan, yaitu :

1. Mengembalikan hak-hak sipil dan kebebasan sipil;
2. Pemerintah Pusat harus memberikan hak pengelolaan dana pada Pemerintah Daerah;
3. Preferensi idealitik dari Pemerintah Pusat atas sektor pembangunan harus fleksibel dengan preferensi dari Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah Pusat harus dapat mengembangkan standard-standard baru yang dapat memperkuat tanpa mendikte;

5. Berusaha memberikan kekuasaan lebih dahulu kepada rakyat.

Desentralisasi Politik atau Devolusi dalam konteks di atas, operasionalisasinya adalah pada penegakan kedaulatan lembaga legislatif di daerah. Lebih dalam dari hal tersebut, Hermawan Sulistyono (1999 : 25) mengemukakan 4 (empat) faktor pengukur tingkat demokratisasi di daerah, yaitu :

- 1) *Political will* Pemerintah Pusat dan derajat transfer kewenangan bagi daerah ;
- 2) Derajat budaya, perilaku dan sikap yang kondusif bagi pembuatan keputusan dan administrasi yang *decentralized*,
- 3) Kesesuaian kebijakan dan program yang dirancang bagi pembuatan keputusan dan manajemen yang *decentralized*,
- 4) Derajat ketersediaan sumber daya finansial, sumber daya manusia dan fisik bagi organisasi yang mengemban tanggung jawab yang diserahkan.

Dalam konteks demokratisasi *civil society* sebagai salah satu *political resources* bagi demokrasi merupakan suatu corak hubungan antara negara dan kelompok sosial yang bercorak *self-organized*. Dengan eksistensi *civil society* tersebut *political will* dari pemerintah pusat seharusnya membentuk *frame-work* dengan masyarakatnya sehingga apa yang diinginkan oleh

masyarakat yang notabene telah memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kekuasaan dapat diakomodir melalui kebijakan-kebijakan yang mengedepankan persepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

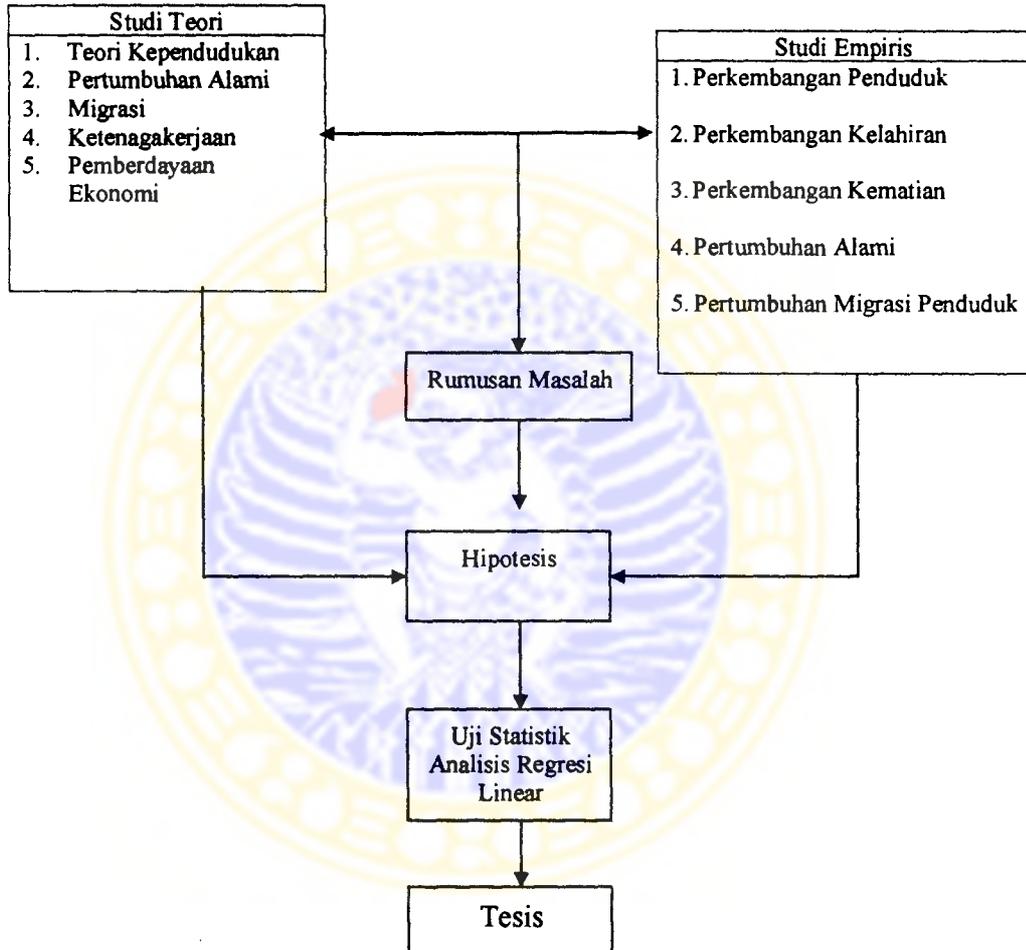
Selain itu kompetensi masyarakat sangat terkait dengan potensi perwujudan demokrasi di mana dengan tingkat literasi dan pendidikan rata-rata masyarakat merupakan ukuran yang absolut dalam mendelegasikan kekuasaan sebagai wujud desentralisasi tersebut. Apabila hal-hal pokok diatas telah terpenuhi, tidak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi pemerintahan melalui Otonomi Daerah termasuk didalamnya pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Kependudukan sebagai suatu kebijakan yang prospektif terhadap keinginan-keinginan investor sektor-sektor unggulan Kota Batam dan preventif terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang akan muncul apabila kebijakan Perdaduk ini tidak diberlakukan.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir

Kerangka proses berfikir dalam proposal penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :



Gambar : 3.1
KERANGKA PROSES BERFIKIR

Data *time series* pertumbuhan alami, migrasi, jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat :

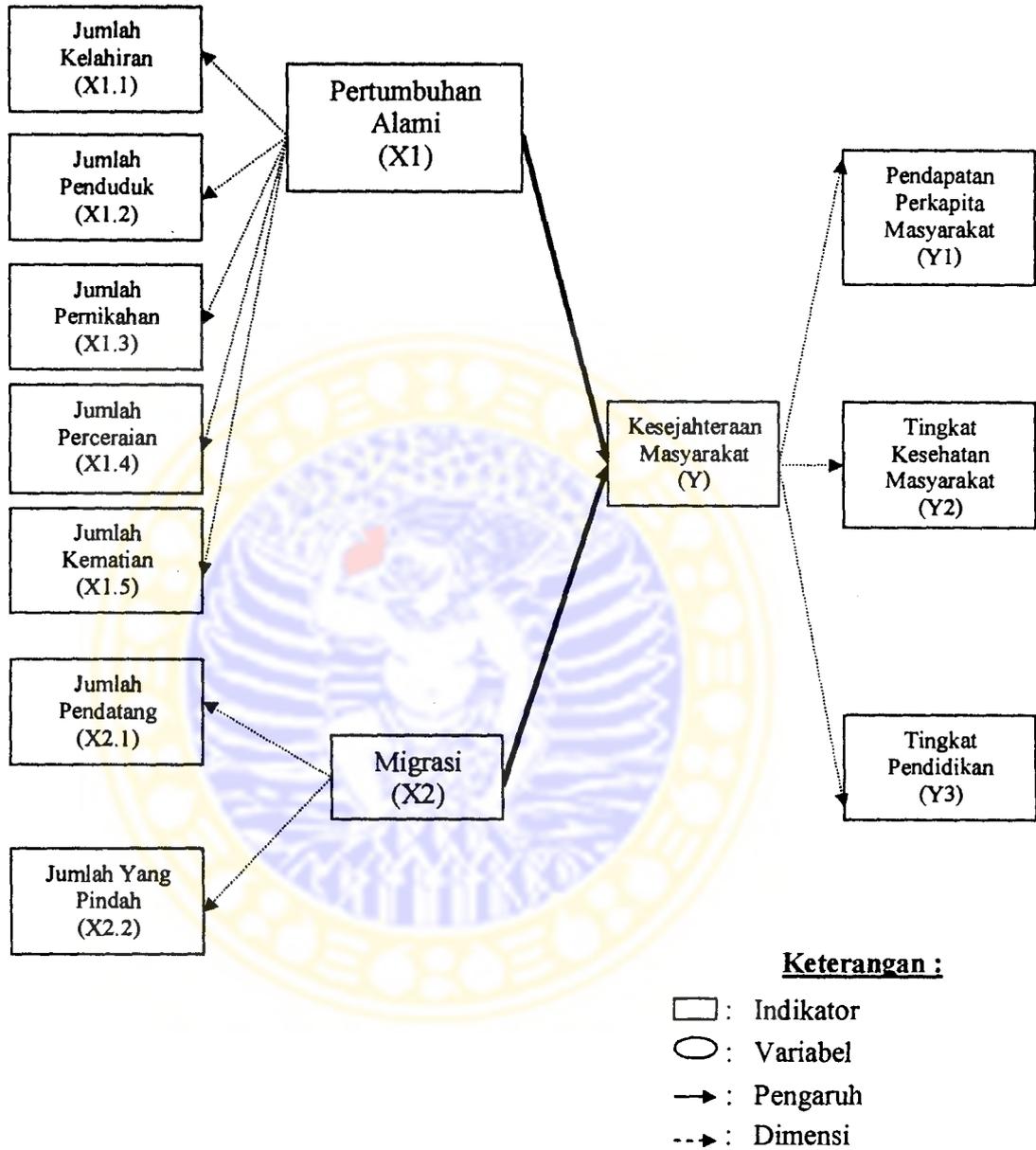
TABEL 3.1.
Data Penelitian

Tahun	Pertumbuhan Alami (X1)	Migrasi (X2)	Jumlah Penduduk	Kesejahteraan Masyarakat (Y)		
				Pendapatan Perkapita (Y1)	Tk Pendidikan (Y2)	Tk Kesehatan (Y1)
1992	-	-	95.800	3,87	-	-
1993	2.094	9.706	107.600	4,09	7,22	12,78
1994	2.472	12.928	123.000	4,76	7,38	10,32
1995	2.701	20.513	146.214	5,61	7,94	9,90
1996	2.248	31.355	162.477	5,87	7,99	9,08
1997	2.509	48.999	196.080	6,97	8,01	12,32
1998	2.721	8.962	247.588	7,79	8,32	12,07
1999	5.672	86.600	254.745	7,52	8,72	10,43
2000	4.358	99.470	266.428	5,66	8,94	12,30
2001	4.690	59.933	358.700	5,68	9,24	11,78
2002	3.396	19.404	462.528	5,42	9,975	12,80
2003	2.490	10.220	527.151	5,91	10,97	9,10

Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Batam, 2004
Dinas Pendidikan Kota Batam, 2004.
Dinas Kesehatan Kota Batam
Biro Pusat Statistik Kota Batam, 2004

3.2 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konsep berfikir di atas akan disusun kerangka konseptual secara sistematis seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 3.2
KERANGKA KONSEPTUAL

3.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka kami akan melakukan penelitian dengan hipotesis sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk alami secara signifikan mempengaruhi pendapatan masyarakat Kota Batam
2. Migrasi penduduk secara signifikan mempengaruhi pendapatan masyarakat Kota Batam



BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka digunakan pendekatan kuantitatif melalui penelitian lapangan yaitu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perihal yang menjadi pokok bahasan. Jenis penelitian tersebut digolongkan sebagai *explanatory research*, yaitu jenis penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel penelitian. Akhir dari penelitian ini adalah menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karenanya penelitian ini juga dinamakan *testing research*. Walaupun uraiannya mengandung deskripsi, namun sebagai penelitian relasional fokusnya terletak pada penjelasan hubungan antar variabel (Singarimbun & Effendi, 1995).

4.2. Populasi, Sampel, Besaran Sampel (Sample Size), dan Prosedur Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kota Batam dengan tujuan mencari kerja di Batam, Masyarakat Batam, investor dan birokrat (pegawai Perdaduk) Kota Batam. Akan tetapi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series selama 10 tahun terakhir maka populasi dan sampel digunakan untuk mempertegas

variabel pertumbuhan alami dan migrasi sangat terkait dengan penduduk Kota Batam sebagai populasi dan sampel dalam penelitian ini. Adapun pembagian sampel tersebut adalah :

- a. Diambil sampel sebesar 50 penduduk Kota Batam (masyarakat tempatan dan yang baru datang) .
- b. Diambil 8 (delapan) investor/PMA yang mewakili kawasan industri Batam (Batamindo, Kabil, Batam Centre dan Batu Ampar).
- c. Birokrat di lingkungan Dinas Kependudukan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindag, BPMD dan BAPPEDA Kota Batam.

4.3. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Mengingat bahwa variabel-variabel dalam penelitian bukan merupakan variabel yang bersifat *observed* yang diukur dengan data-data yang ada pada instansi yang ada di Kota Batam.

4.3.1. Identifikasi Variabel Penelitian

- a. Variabel terikat (*Dependent Variable*) adalah Kesejahteraan masyarakat (Y) meliputi , Tingkat pendapatan masyarakat, Tingkat pendidikan masyarakat dan Tingkat pendidikan masyarakat Kota Batam.

b. Variabel Bebas (*Independent Variables*) meliputi :

- Pertumbuhan alami (X1) meliputi jumlah kelahiran, jumlah penduduk, jumlah pernikahan, jumlah perceraian dan jumlah kematian.
- Migrasi (X2) meliputi jumlah penduduk pendatang dan jumlah penduduk yang pindah.

4.3.2. Definisi Operasional

- a. Kesejahteraan masyarakat adalah seberapa besar tingkat kemampuan masyarakat Kota Batam untuk meningkatkan daya beli yang diukur dengan tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan masyarakat.
- b. Pertumbuhan alami adalah jumlah perkembangan jumlah kelahiran, jumlah penduduk, jumlah pernikahan, jumlah perceraian dan jumlah kematian.
- c. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik melewati batas politis negara maupun batas administrasi dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap ditempat tujuan tersebut.

Untuk lebih mengetahui batasan-batasan definisi operasional dalam penelitian ini maka dapat dibuat dalam tabel perbandingan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 :
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	
Pendapatan Masyarakat (Y)	Kemampuan masyarakat untuk meningkatkan daya belinya.	1. Tingkat pendidikan (Y1) 2. Tingkat kesehatan masyarakat (Y2) 3. Tingkat Pendapatan masyarakat (Y3)	Peningkatan pendapatan masyarakat
Pertumbuhan Alami (X1)	Perubahan jumlah penduduk secara alami	1. Jumlah kelahiran (X1.1) 2. Jumlah penduduk (X1.2) 3. Jumlah pernikahan (X1.3) 4. Jumlah perceraian (X1.4) 5. Jumlah kematian (X1.5)	
Migrasi (X2)	Perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.	1. Jumlah penduduk pendatang (X2.1) 2. Jumlah penduduk yang pindah (X2.2).	Berbahnya jumlah penduduk

4.4. Instrumen Penelitian

Instrumen yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder berupa data time series selama 10 tahun terakhir dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN, Biro Pusat Statistik Kota Batam, Dinas Pendapatan Kota Batam dan Badan Perencanaan dan Litbang Kota Batam. Di samping itu sebagai data pendukung digunakan instrumen paduan wawancara secara langsung

terhadap responden dan melalui daftar kuesioner yang telah dibuat guna mendapatkan data primer yang di perlukan.

4.5 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelancaran dalam melakukan penelitian ini, maka data-data diambil dari Dinas/Instansi Pemerintah di Kota Batam, untuk data yang bersifat sekunder. Adapun dinas/instansi dimaksud antara lain adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kota Batam, Biro Pusat Statistik Kota Batam, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam, Badan Perencanaan dan Litbang Kota Batam. Antara lain data-data yang akan diambil tersebut adalah data jumlah penduduk riil, jumlah penduduk berdasarkan usia, pendapatan penduduk, PDRB, PAD dan Pendapatan Perkapita, Tingkat pendidikan, Tingkat Kesehatan dalam 10 tahun terakhir. Untuk data yang bersifat primer maka dilakukan teknik pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur.

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kota Batam. Jangka waktu pelaksanaan penelitian ini diperkirakan akan dilaksanakan **selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 03 Januari sampai Maret 2005**, yang meliputi kegiatan penyusunan proposal, penelitian lapangan, pengolahan data hingga penyusunan laporan akhir (tesis).

4.7. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan metoda Analisis Regresi Linear yang tergolong dalam metoda deskriptif. Analisis ini lebih menekankan pada hubungan antar ketiga variabel secara langsung dengan memasukkan data-data dalam kurun waktu tertentu. Untuk analisis deskriptif kuantitatif, digunakan untuk melihat tingkat pendapatan masyarakat yang dikaitkan dengan pertumbuhan alami dan migrasi kependudukan. Secara kuantitatif, maka data-data akan disampaikan dengan menggunakan bantuan tabel dan grafik.

Dalam menganalisis data kuantitatif maka salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel baik variabel bebas maupun terikat adalah analisis regresi linear, dimana dalam analisis tersebut akan dilihat pengaruh dari variabel *independent* terhadap variabel terikat dimana kedua-duanya merupakan variabel *latent (unobserved variabel)* yang tidak dapat diukur secara langsung sehingga dengan menggunakan variabel indikator untuk dapat menganalisa.

Secara matematis bentuk persamaan analisis regresi linear yang menunjukkan hubungan antara variabel adalah seperti pada persamaan berikut ini :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots 01$$

Dimana :

$$Y = \text{Kesejahteraan Masyarakat } (\Delta Y)$$

- X_1 = Pertumbuhan penduduk alami (ΔX_1)
- X_2 = Perubahan jumlah penduduk berdasarkan migrasi (ΔX_2).
- a = koefisien parameter
- ε = error term

4.8. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hubungan antara variabel latent dengan variabel indikator, maka digunakan analisis regresi linear di mana akan dilihat hubungan antar variabel setelah memasukkan data time series ketiga variabel tersebut. Hasil analisis bila faktor loading setelah diuji dengan uji t diperoleh harga $p < 0,5$ berarti hipotesis pengujianya diterima. Untuk menguji hipotesis 1-2 digunakan pemodelan persamaan struktural, dimana bila koefisien yang diperoleh setelah diuji dengan uji t diperoleh harga $p < 0,5$, berarti hipotesis penelitiannya diterima.

BAB 5

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1 Profil Wilayah Kota Batam

Wilayah Kota Batam merupakan salah satu pulau yang berada di antara Selat Malaka dan Selat Singapura yang terdiri dari 329 pulau seperti pulau Batam merupakan pulau yang terbesar diantara pulau-pulau lainnya. Nama pulau ini sudah dikenal pada Traktat London tahun 1824 dengan penduduk asli Kota Batam adalah orang-orang Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut dengan karakteristik tempat tinggal penduduk tersebut berada pada pesisir pantai Pulau Batam sejak jaman kerajaan Tumasik (sekarang Singapura) di akhir tahun 1300 atau pada awal abad ke-14.

5.1.1. Pembentukan Kota Batam

Pada tahap awal Kota Batam yang kita kenal sebagai Daerah Otonom seperti saat ini merupakan sebuah wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tingkat II Kepulauan Riau. Pembentukan Kota Batam dari wilayah Kecamatan menjadi Kotamadya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, dengan cakupan wilayah pemerintahan yang meliputi Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur. Perubahan status dimaksud merupakan implementasi asas Dekonsentrasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Sementara itu motivasi terbentuknya Kotamadya Batam bertujuan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sebagai akibat berkembangnya wilayah Batam menjadi daerah pengembangan industri, perdagangan, alih kapal, pergudangan dan basis logistik serta pariwisata.

5.1.2. Badan Otorita Batam

Sejak ditetapkannya Pulau Batam sebagai basis logistik dan operasional untuk industri yang berkaitan dengan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai maka sejak itu pula Pulau Batam secara signifikan berubah menjadi kawasan strategis dalam menanamkan investasi sehingga daya tarik Pulau ini semakin meningkat baik di tingkat regional maupun tingkat Internasional. Untuk lebih mengarahkan hal tersebut maka Direktur Utama Pertamina yang pada saat itu dijabat oleh H. Ibnu Sutowo berupaya menjadikan kawasan ini sebagai kawasan basis logistik Pertamina.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1970, Ibnu Sutowo ditunjuk sebagai penanggung-jawab pengelolaan kawasan ini terutama yang menyangkut penggunaan biaya pembangunan proyek yang anggarannya dialokasikan dari anggaran Pertamina. Pada akhirnya, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah Industri melalui Keppres Nomor 41 tahun 1973 dan Ibnu Sutowo dikukuhkan sebagai

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) yang meliputi beberapa pulau lainnya seperti Pulau Janda Berhias, Pulau Ngenang, Tanjung Sauh, Pulau Moi-Moi, dan Pulau Kasem.

Pada tahap perkembangan selanjutnya dengan Keppres Nomor 33 tahun 1974, dibentuk beberapa Kawasan Berikat (*Bonded Zone*). Pada saat itu Pemerintah menunjuk PT. Persero Batam sebagai Pengusaha *Bonded Zone* di kawasan Sekupang dan Batu Ampar. Dalam perkembangan pengelolaan kawasan ini terjadi berbagai pelimpahan hak dan wewenang dari Menteri Dalam Negeri dengan melalui Kepmendagri Nomor 77 Tahun 1977 tentang pemberian hak pengelolaan atas seluruh areal yang terletak di Pulau Batam termasuk tanah gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang, Pulau Kasem dan Moi-Moi kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Kemudian diikuti oleh Menteri Perhubungan dengan memberikan hak pengelolaan atas pelabuhan Sekupang, Batu Ampar, Nongsa dan Kabil kepada OPDIPB dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal melimpahkan wewenang kepada OPDIPB untuk mengurus dan menilai permohonan calon investor baik dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 1978 seluruh Pulau Batam ditetapkan sebagai Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) melalui Keppres Nomor 41 Tahun 1978.

5.1.3. Barelang (Batam-Rempang-Galang)

Pada tahun 1992 melalui Keppres Nomor 28 Tahun 1992, kawasan daerah industri Pulau Batam dengan status Kawasan Berikat diperluas ke Pulau Rempang dan Galang dengan sebutan Barelang (Batam, rempang dan Galang). Pulau Rempang dan Galang sebelumnya merupakan pulau-pulau di Kecamatan Galang Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dengan luas wilayah Pulau Rempang 168 km² dan luas wilayah Pulau Galang 80 km² serta Pulau Galang Baru seluas 32 km². Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya usaha di Batam dan terbatasnya daya dukung lahan di Pulau Batam.

Masuknya Pulau Rempang dan Galang dan pulau-pulau disekitarnya ke dalam wilayah Pulau Batam, maka luas wilayah Kota Batam keseluruhan berubah dari 417,5 km² (51.500 ha) menjadi 715 km² (71.500 ha). Luas wilayah Kota Batam sebesar 115 % besarnya luas wilayah Singapura.

Untuk penggabungan Pulau Rempang dan Pulau Galang ini pemerintah telah membangun enam jembatan yang menghubungkan Pulau Batam-Pulau Tonton, Pulau Tonton- Pulau Nipah, Pulau Nipah-Pulau Setokok, Pulau Setokok-Pulau Rempang, Pulau Rempang-Pulau Galang, Pulau Galang-Galang Baru dengan panjang total keenam jembatan mencapai 2.194 m.

5.2. Otonomi Daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagai pengejawantahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kota Batam yang pada awalnya sebagai Kotamadya administratif berubah statusnya menjadi daerah otonom Kota Batam yang dipimpin oleh seorang Walikota. Untuk itu struktur pemerintahan dalam penataan wilayah Kota Batam mengalami perubahan dengan pemekaran dari 3 Kecamatan menjadi 8 Kecamatan, di samping itu terjadi juga penambahan jumlah Dinas teknis dan perubahan status beberapa lembaga Instansi Vertikal menjadi Instansi Otonom.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Batam, maka Pemerintah Kota Batam bekerja-sama dengan Badan Otorita Batam yang telah disempurnakan tugas, fungsi dan kedudukannya sesuai dengan bunyi pasal 17 dan pasal 21 Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pasal 17 ayat 1 : Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, kewenangan daerah sebagai daerah otonom mencakup seluruh bidang pemerintahan, termasuk semua kewenangan

wajib kecuali bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lain.

- b. Pasal 17 ayat 2 : Kewenangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
- c. Pasal 21 ayat 91) : Dengan terbentuknya Kota Batam sebagai Daerah Kota Batam, Pemerintah Kota Batam dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam.

5.3. Keadaan Geografis

Secara geografis Kota Batam mempunyai posisi yang strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak 12,5 mil laut dengan negara Singapura, sehingga memosisikan Kota Batam sebagai pintu gerbang lokomotif pengembangan dan pembangunan ekonomi di Kota Batam, Provinsi Riau dan Nasional. Sehingga dalam pengelolaan dan pemberdayaan wilayah ini sangat membutuhkan inovasi dan kreasi dalam memanfaatkan posisi strategis dimaksud.

5.3.1. Letak, Batas dan Luas

Kota Batam terletak antara 0 derajat 55' – 1 derajat 55' Lintang Utara dan 103 derajat 45' – 104 derajat 10' Bujur Timur. Wilayah Kota Batam secara administratif berbatasan langsung dengan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Riau dengan Kabupaten Karimun. Batas-batas wilayah Kota Batam tersebut meliputi :

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Kepri.
- Sebelah Selatan: Kecamatan Senayang Kabupaten Kepri.
- Sebelah Barat : Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

Berdasarkan Undang-undang 53 Tahun 1999 luas wilayah Kota Batam secara keseluruhan seluas 1.570.35 Km².

5.3.2. Karakteristik Wilayah Kota Batam

Wilayah Kota Batam terdiri dari 329 buah pulau besar dan pulau kecil, yang letaknya satu dengan lainnya dihubungkan oleh perairan atau lautan. Permukaan tanah di Kota Batam dapat digolongkan datar dengan variasi berbukit dan berbatu muda dengan ketinggian maksimum 160 m di atas permukaan laut. Dilihat dari segi perputaran arus laut yang terletak di Selat Malaka, Pulau ini merupakan daerah subur bagi kehidupan perikanan dan biota lainnya. Sementara ekosistem di wilayah ini ditemukan satwa liar yang terdiri dari 8 jenis kelas mamalia, 16 jenis heasaves dan fertilia yang menggunakan habitat seperti pantai, mangrove, rawa/danau,

ladang/kebun, hutan sekunder dan hutan primer. Wilayah Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara $20,40^{\circ}\text{C}$ sampai 23°C , dan suhu maksimum berkisar antara $30,40^{\circ}\text{C}$ sampai 33°C , sedangkan tekanan udara rata-rata minimum 1005,6 MBS dan maksimum 1013,8 MBS. Sementara kecepatan angin maksimum hari hujan di Kota Batam rata-rata perbulan 15 hari dengan rata-rata curah hujan perbulannya 154,4 m. Sedangkan kelembaban udara rata-rata mencapai 19 % hingga 78 %.

5.3.3. Wilayah Administrasi

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Kota Batam dibagi menjadi 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan/Desa yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Batu Ampar terdiri dari 8 Kelurahan
- b. Kecamatan Nongsa terdiri dari 8 Kelurahan.
- c. Kecamatan Lubuk Baja terdiri dari 5 Kelurahan
- d. Kecamatan Sungai Beduk terdiri dari 4 Kelurahan
- e. Kecamatan Sekupang terdiri dari 8 Kelurahan
- f. Kecamatan Belakang Padang terdiri dari 6 Kelurahan.
- g. Kecamatan Bulang terdiri dari 6 Kelurahan.
- h. Kecamatan Galang terdiri dari 6 Kelurahan.

5.3.4. Demografi

Kota Batam yang dijadikan sebagai pusat pengembangan industri menimbulkan arus migrasi yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan penduduk di wilayah ini. Pada bulan Maret 2002 penduduk Kota Batam yang telah diregistrasi sebanyak 530.605 jiwa. Dalam perkembangan terakhir berdasarkan data tahun 2004 sebanyak 562.105 jiwa (*Dinas Kependudukan Kota Batam, Mei 2004*)

5.4. Eksistensi Investasi, Sarana dan Prasarana Penunjang Investasi

Pertumbuhan investasi pada awalnya mempunyai korelasi yang positif dengan angka kunjungan wisata. Seperti angka kunjungan wisata tersebut dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat besar. Hal banyak dipengaruhi oleh berbagai fasilitas pendukung investasi yang ditawarkan oleh pengelola kawasan Batam sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini diambil alih oleh Badan Otorita Batam yang dalam beberapa tahun belakangan ini sudah mulai menyerahkan beberapa kewenangan sesuai dengan semangat otonomi daerah yang diberlakukan secara nasional.

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Batam menurut kebangsaan dalam triwulan I tahun 2004/2005 dapat kita lihat sebagai mana pada tabel berikut :

TABEL 5.1.
Perkembangan jumlah Wisman ke Batam Menurut Kebangsaan

NEGARA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	TRI WULAN I	
				Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6
Singapura	56.117	58.224	67.797	182.138	66,63
Malaysia	10.243	9.617	10.662	30.552	11,17
Korsel	9.045	6.555	8.520	24.120	8,82
Jepang	3.820	3.146	3.832	10.797	3,95
Inggris	759	1.181	1.212	3.152	1,15
Taiwan	748	840	940	2.528	0,92
Australia	610	570	676	1.856	0,68
Amerika	654	475	620	1.749	0,64
Belanda	296	302	299	897	0,26
Jerman	237	285	180	702	0,33
Lainnya	4.519	5.071	5.303	14.893	5,45
	87.048	86.266	100.041	273.355	100

Sumber : Profil Kota Batam, 2004

Dari tabel di atas dapat kita lihat kecenderungan kunjungan wisata yang juga merupakan sarana utama kunjungan berupa survey investasi mancanegara yang semakin menurun untuk tiap bulannya yang pada waktu yang bersamaan terdapat berbagai rencana-rencana revisi terhadap sistem kebijakan dan manajemen pengelolaan kawasan berikat yang selama ini disandang Kota Batam sebagai salah satu wilayah lokomotif

perekonomian Nasional. Penurunan angka tersebut dilihat secara faktual sangat mempengaruhi keinginan investor untuk bersikap *wait and see* terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi terhadap pengelolaan kawasan dimaksud. Dengan demikian penurunan angka tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap akses investasi yang sangat riskan dan mengikuti perkembangan yang terjadi di kawasan bonded zone Batam.

Negara-negara Eropa sebagai negara tujuan promosi investasi baik impor maupun ekspor yang sangat potensial juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari angka riil yang diperlihatkan dalam tabel kunjungan wisata tersebut di atas memang menunjukkan angka kenaikan akan tetapi kunjungan wisata didominasi oleh wisatawan dengan tujuan *entertainment* dan persentase survey investasi sangat kecil. Hal tersebut sangat terkait dengan perkembangan terakhir mengenai status hukum kawasan ini yang sesuai dengan kesepakatan Internasional terdapat berbagai keringanan-keringanan dalam berinvestasi yang dapat memacu pertumbuhan kualitas dan kuantitas investasi di kawasan berikat Batam.

Sarana dan prasarana baik fisik maupun non-fisik dalam suatu kawasan yang akan menarik minat investasi merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pengelolaan kawasan tersebut dalam menarik minat investasi dan sekaligus mengarahkan tujuan investasi tersebut untuk dapat mengakomodasikan kalangan masyarakat miskin yang selama ini mengalami marginalisasi kesempatan dalam bekerja.

Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel dibawah ini :

TABEL 5.2.
 Fasilitas Penunjang Investasi dan Infrastruktur Kota Batam

NO.	DESKRIPSI	UNIT	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
01	Jalan (Road)	Km	238,54	
	- Kelas I			
	- Kelas II		124,40	
	- Kelas III A			
	- Kelas IV		195,02	
	- Kelas V		153,38	
	- Tidak Terinci		85,61	
02	Jembatan (Bridge)	Meter		
	- Batam – Tonton		642	
	- Tonton – Nipah		420	
	- Nipah – Setokok		270	
	- Setoko – Rempang		365	
	- Rempang – Galang		385	
	- Galang – Galang Baru		180	
03	Waduk (Water Reservoir)	Vol M ³		
	- Waduk Baloi		200.000	Operation 100 %
	- Waduk Sei Ladi		8.800.000	Operation 100 %
	- Waduk Sei Harapan		4.800.000	Operation 100 %
	- Waduk Nongsa		700.000	Operation 100 %
	- Waduk Duriangkang		62.000.000	Operation 100 %
	- Waduk Muka Kuning		13.400.000	Operation 100 %
04	Listrik (Electricity)	MW		
	- PLTD PLN		88	
	- PLTD Swasta		144	
05	Telekomunikasi (Telecommunication)	SS/LU		
			38.872	
			25.016	
			10.856	
	A. Pelabuhan (Sea Harbour)			Rencana Akhir /
	a) Sekupang			Final Plan
	- Berth Capacity	DWT	10.000	15.000
	- Berth Lenght	Meter	177	1.200
	- Basin Depth	Meter	11	12
	- Open Storage	M ²	116.100	143.600
	- Ware House	M ²	42.240	92.000
	(bersambung.....)			

NO.	DESKRIPSI	UNIT	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<i>(lanjutan.....)</i>			Rencana Akhir / Final Plan
	b) Batu Ampar			
	- Berth Capacity	DWT	35.000	35.000
	- Berth Lenght	Meter	1.100	3.600
	- Basin Depth	Meter	14	14
	- Open Storage	M ²	214.000	230.950
	- Ware House	M ²	19.500	208.950
	c) Kabil			Rencana Akhir
	- Berth Capacity	DWT	35.000	150.000
	- Berth Lenght	Meter	400	5.500
	- Basin Depth	Meter	14	18
	- Open Storage	TEU'S	100.000	2.500.000
	- Ware House	TEU'S	1.890	
	B. Bandara Hang Nadim			Rencana Akhir
	- Runway	M	400 x 45	4000 x 45
	- Apron	M ²	130.500	170.000
	- Terminal	M ²	31.500	88.000
	- Aircraft	Type	B-747	B-747 MD-11
	- Terminal Capacity	Org/ Th	3.300.000	
	- Storage	Ton	16.230	
	- Fuel Storage	Kilo Lt	52.000	

Sumber : Profil Batam, 2004

Dari tabel di atas dapat kita lihat kapasitas sarana dan prasarana yang disiapkan dalam Kota Batam sangat diprioritaskan untuk mendukung basis investasi yang bergerak di bidang industri manufaktur modern, perdagangan internasional, alih kapal, dan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam pertumbuhan perekonomian di Batam yang pada gilirannya mampu mengangkat derajat orang miskin yang berbaur dalam sistem kemasyarakatan di pulau ini. Hal tersebut dapat diasumsikan sebagai subsidi infrastruktur dalam mengembangkan kawasan ini sebagai

kawasan perekonomian baru di Indonesia yang kompetitif terhadap perekonomian global.

Penyiapan infrastruktur dimaksud dilakukan secara bertahap dan terpadu mulai dari penyiapan tahap awal direncanakan dengan adanya perpaduan dengan tahap selanjutnya sesuai dengan *master plan* yang diperuntukkan dalam penyiapan kawasan ini sebagai kawasan perdagangan dan basis industri manufaktur modern, alih kapal serta pariwisata yang kompetitif. Dengan kondisi yang demikian Pemerintah Kota Batam dapat membuat kebijakan-kebijakan yang searah dengan kondusifitas investasi tersebut yang khusus mengakomodasi pengentasan kemiskinan di Kota Batam.

5.5. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sehingga data-data primer yang disajikan merupakan data *time series*. Adapaun data-data yang akan dihubungkan adalah sebagai berikut :

5.5.1 Jumlah Penduduk Kota Batam

Mobilitas penduduk Kota Batam dalam beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi yang sangat tinggi sebagai sebuah kawasan perbatasan strategis antara negara-negara dalam jalur perdagangan dunia. Hal ini menyebabkan daya tarik Kota Batam untuk dikunjungi

menjadi sangat tinggi. Jumlah penduduk tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel : 5.3
JUMLAH PENDUDUK KOTA BATAM TAHUN 1978 – Nopember 2004 (JIWA)

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Setahun
1983	43.000	6,22
1988	79.400	13,05
1989	90.500	13,98
1990	95.800	5,86
1991	107.600	12,32
1992	123.000	14,31
1993	146.214	18,87
1994	162.477	11,12
1995	196.080	20,68
1996	247.588	26,27
1997	254.745	2,89
1998	266.428	4,59
1999	358.700	34,63
2000	462.528	28,95
2001	527.151	21,37
2002	549.951	4,32
2003	562.661	2,19

Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk yang sangat pesat sehingga peluang Kota Batam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi penduduk tersebut sangat besar.

5.5.2 Pendapatan Asli Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di seluruh Indonesia secara nasional, maka Kota Batam sebagai salah satu daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan roda pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara terpadu di Kota Batam. Untuk mendukung berbagai program terpadu yang dikemas dalam rencana pembangunan Kota Batam, perlu dukungan finansial dan pembiayaan pembangunan yang cukup besar dan bersumber dari potensi yang ada di Kota Batam. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tiap tahunnya mengalami perubahan sesuai dengan struktur ekonomi makro di Kota Batam. Jumlah penduduk Kota Batam sangat berpotensi dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Batam yang apabila dibandingkan secara nasional, pertumbuhan penduduk Kota Batam merupakan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Untuk melihat perkembangan PAD dimaksud dapat dilihat dalam table dibawah ini.

Tabel 5.4
REALISASI PENERIMAAN DAERAH KOTA BATAM
(Milyar Rupiah)

Tahun	Jumlah PAD	PPH	PPN	Pajak Lainnya
1	2	3	4	5
1996	6,13	147,02	7,45	2,18
1997	9,85	243,38	7,46	2,50
1998	14,97	653,89	59,02	2,91
1999	18,75	779,18	73,96	3,25
2000	21,89	705,21	74,00	5,60
2001	31,36	887,65	62,17	5,71
2002	46,61	805,04	55,53	12,63
2003	47,69	787,14	121,63	14,24
2004	56,05	771,3	139,87	15,4

Sumber : *Perekonomian Kota Batam, 2004.*

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah Kota Batam dalam periode waktu sembilan tahun terakhir. Secara seksama perkembangan sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut dapat dilihat dari data statistik yang mempunyai relevansi positif.

Dengan demikian pendapatan masyarakat Kota Batam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketersediaan anggaran pembangunan Kota Batam secara keseluruhan, sehingga membutuhkan strategi pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan bagi kelangsungan pembiayaan pembangunan tersebut.

Strategi pengembangan konsep otonomi daerah secara komprehensif dan terencana dengan baik mampu mengantisipasi perubahan-perubahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan di Kota Batam.

Sebagai gambaran umum, untuk melihat perkembangan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat dilihat seperti APBD Kota Batam Tahun 2004 hampir mencapai Rp. 400.983.252.000,- sementara RAPBD Tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 18,80 persen dengan angka Rp. 325.578.000.000,-. Penurunan angka yang sangat drastis tersebut terjadi sebagai konsekuensi terpisahnya Kota Batam dari Provinsi Riau yang memberikan kompensasi dana bagi hasil minyak bumi sebesar 70 milyar lebih. Dari kondisi ini, potensi-potensi yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau secara optimal dapat dikelola oleh

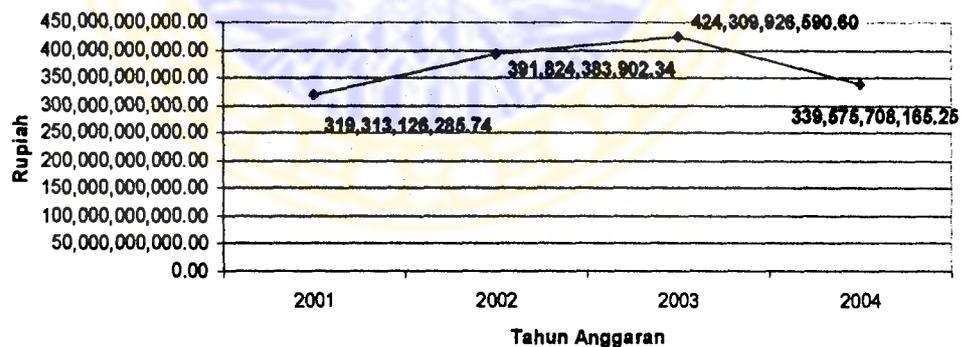
Pemerintah Provinsi Kepri dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat di daerah otonom dalam Provinsi tersebut.

5.5.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Batam sebelum pembentukan Provinsi Kepri berasal dari berbagai sumber penerimaan seperti dana bagi hasil minyak bumi dari Provinsi Riau yang jumlahnya sangat signifikan terhadap APBD Kota Batam.

Secara keseluruhan penerimaan daerah Kota Batam sebelum pembentukan Provinsi Kepri dapat dikategorikan penerimaan daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2004. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.5
PENERIMAAN APBD KOTA BATAM
Tahun Anggaran 2001-2004



Sumber : *Perekonomian Kota Batam, 2004.*

Dari tabel tersebut di atas dapat digunakan untuk menguji kebenaran proposisi pertama yaitu pertumbuhan penduduk alami yang didorong oleh kondisi investasi akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat di Kota Batam. Hal ini lebih terfokus pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan sebagaimana telah diangkat sebelumnya seperti pajak-pajak daerah serta pajak-pajak lainnya yang sah mengalami perubahan mendasar baik dalam pengelolaan maupun institusi yang berwenang dalam mengelola sumber-sumber pembiayaan itu. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proposisi pertama dapat diterima sehingga dengan perubahan tersebut akan membutuhkan analisis komprehensif dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya secara efektif dan efisien. Analisis yang digunakan dalam pengelolaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Batam mempunyai peranan penting dalam mengetahui peluang dan tantangan dalam menghasilkan strategi pengelolaan dan penggalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan setelah pembentukan Provinsi Kepri.

Penerimaan RAPBD Kota Batam Tahun 2005 diperkirakan sebesar Rp. 325.578.000.000,- atau Tiga Ratus dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) turun 18,80 % jika dibandingkan dengan penerimaan APBD Murni Kota Batam Tahun 2004. Adapun sumber-sumber penerimaan tersebut adalah :

1. Pembiayaan sektor penerimaan daerah sebesar Rp. 14.773.000.000,- (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga

juta rupiah) turun 77,72 % jika dibandingkan dengan Tahun 2004 yang bersumber dari sisa anggaran Tahun Lalu sebesar Rp. 12.773.000.000,- (Dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan pengembalian pokok pinjaman Dana Bergulir Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

2. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 60.805.000.000,- (Enam puluh milyar delapan ratus lima juta rupiah) naik sebesar 8,48 % jika dibandingkan dengan APBD Murni Kota Batam Tahun 2004. Terdiri dari pajak Daerah sebesar Rp.32.585.000.000,- (Tiga puluh Dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) naik sebesar 18,38 % jika dibandingkan dengan Tahun 2004. Retribusi Daerah sebesar Rp. 16.420.000.000,- (Enam belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) naik sebesar 5,07 % jika dibandingkan dengan Tahun 2004. Laba Perusahaan Milik Daerah sebesar 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) turun 10 % dibandingkan dengan Tahun 2004, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.10.900.000.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus juta rupiah) turun sebesar 8,40 % jika dibandingkan dengan Tahun 2004.
3. Dana perimbangan sebesar Rp. 246.600.000.000,- (dua ratus empat puluh enam milyar enam ratus juta rupiah) turun sebesar 10,09 % jika dibandingkan dengan Tahun 2004. Adapun sumber Pendapatan Dana perimbangan Kota Batam Tahun 2005 adalah

Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar rupiah) naik sebesar 9,85 % jika dibandingkan dengan Tahun 2004. Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 18.600.000.000,- (Delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) turun sebesar 77,78 % jika dibandingkan dengan Tahun 2004. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima milyar rupiah) naik sebesar 19,98 % jika dibandingkan dengan Tahun 2004, serta Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Provinsi sebesar 28.000.000.000,- (Dua puluh delapan milyar rupiah) naik sebesar 31,61 % jika dibandingkan dengan Tahun 2004.

4. Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang berasal dari dana Penyeimbang sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga milyar empat ratus juta rupiah) turun sebesar 21,84 % jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2004.

5.5.4 Pendapatan Perkapita Kota Batam

Pendapatan per kapita merupakan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di Kota Batam setelah dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Batam. Kondisi PDRB tersebut dapat dijadikan sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi Kota Batam dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan seperti sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata dan sektor alih

kapal. Pebandingan kuantitas tersebut diatas dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.6
Pendapatan Per Kapita
Kota Batam, 1992 – 2003 (Juta rupiah)

Tahun	Berlaku	Konstan
1	2	3
Pendapatan Regional Per Kapita		
1992	11,09	3,87
1993	13,06	4,09
1994	13,98	4,76
1995	15,06	5,61
1996	15,87	5,87
1997	16,04	6,97
1998	16,66	7,79
1999	16,94	7,52
2000	13,96	5,66
2001	13,81	5,68
2002	14,12	5,42
2003	15,94	5,91

Sumber : BPS Kota Batam, 2004

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat perbandingan PDRB Per Kapita dengan Pendapatan Regional Per Kapita yang cukup signifikan sehingga potensi-potensi untuk menaikkan PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita melalui sektor unggulan di Kota Batam sangat dimungkinkan yang pada gilirannya akan bermuara pada peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Batam.

Proposisi kedua yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Batam adalah strategi pengembangan konsep otonomi daerah secara komprehensif dan terencana melalui pemberdayaan potensi dan kemampuan aparat birokrat dan *stakeholders* terutama yang berkaitan langsung dalam penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Batam mampu mengantisipasi

perubahan-perubahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan di Kota Batam. Hal ini menunjukkan bahwa proposisi kedua juga diterima sehingga strategi pengembangan konsep otonomi daerah yang mendukung kondusifitas investasi sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan sektor lainnya perlu dipertahankan dan dikembangkan menjadi salah satu indikator utama dalam mengundang minat investasi internasional di Kota Batam.

5.5.5. Deskripsi Perkembangan Investasi

Perkembangan investasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kondisi investasi baik secara kuantitas maupun kualitas yang ada di Kota Batam. Perkembangan investasi di Kota Batam mengalami perubahan mendasar yang diakibatkan banyaknya kebijakan-kebijakan yang sangat sentralistis sehingga membutuhkan rentang kendali dengan batas waktu yang panjang.

Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti dalam table di bawah ini :

Tabel 5.7.
INDIKATOR EKONOMI INDONESIA, 1999 – 2002

Indikator	1997	1998	1999	2000	2001	2002
GDP nilai Konstan 1993 (miliar rupiah)	433.245,9	376.892,5	379.352,5	398.016,9	411.691,0	426.704,5
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,70	-13,01	0,79	4,92	3,44	3,66
Inflasi (%)	11,05	77,63	2,01	9,35	12,55	10,03

Sumber : BPS, 2003.

Dari indikator tersebut diatas dapat kita membandingkan pendapatan domestik pada tahun tertentu dengan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat di prediksi sehingga kemampuan pembiayaan pembangunan suatu daerah.

5.6. Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mengarahkan penelitian ini pada penjelasan-penjelasan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan alami penduduk dan pendapatan masyarakat Kota Batam. Jenis penelitian ini tidak perlu menggunakan hipotesis, sehingga pengaruh pembentukan Provinsi Kepri terhadap pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan Kota Batam dapat dianalisis dari perubahan angka-angka penerimaan pendapatan daerah Kota Batam dari sektor-sektor tertentu sebelum dan sesudah pembentukan Provinsi Kepri.

Untuk sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Batam sebelum pembentukan Provinsi Kepri berasal dari berbagai sumber penerimaan seperti dana bagi hasil minyak bumi dari Provinsi Riau yang jumlahnya sangat signifikan terhadap APBD Kota Batam.

Secara keseluruhan penerimaan daerah Kota Batam sebelum pembentukan Provinsi Kepri dapat dikategorikan penerimaan daerah Kota Batam sampai dengan tahun 2000. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 5.8
Perbandingan Penerimaan Daerah terhadap PDRB Kota Batam
(dalam Juta Rupiah)

Juta Rupiah	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Penerimaan Daerah (jt Rph)	17.680	26.440	33.020	33.540	46.530	73.010
Penerimaan Pajak	137.940	174.780	304.320	768.840	877.060	639.680
PDRB Batam	23.000	31.000	33.000	54.000	58.395	62.000

Sumber : Laporan Perekonomian Kota Batam, 2003

Dari tabel tersebut di atas dapat digunakan untuk menguji kebenaran proposisi pertama yaitu pembentukan Provinsi Kepri dalam kerangka otonomi daerah mempengaruhi potensi dan kemampuan pembiayaan pembangunan Kota Batam. Hal ini lebih terfokus pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan sebagaimana telah diangkat sebelumnya seperti pajak-pajak daerah serta pajak-pajak lainnya yang sah mengalami perubahan mendasar baik dalam pengelolaan maupun institusi yang berwenang dalam mengelola sumber-sumber pembiayaan itu. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proposisi pertama dapat diterima sehingga dengan perubahan tersebut akan membutuhkan analisis komprehensif dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya secara efektif dan efisien. Analisis yang digunakan dalam pengelolaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Batam mempunyai peranan penting dalam mengetahui peluang dan tantangan dalam menghasilkan strategi pengelolaan dan penggalan sumber-sumber pembiayaan pembangunan setelah pembentukan Provinsi Kepri.

Penerimaan RAPBD Tahun 2005 berkurang sebesar RP. 75.403.252.000,- (tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga juta dua ratus

lima puluh dua ribu rupiah) jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2004. Hal ini disebabkan oleh antara lain oleh rencana surplus penerimaan yang akan menjadi Sisa Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2005 yang diperoleh dari Pusat dan daerah sudah dianggarkan pada perubahan APBD Tahun 2004 untuk menutupi defisit penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Migas. Hilangnya Pendapatan Asli Daerah sektor penerimaan lain-lain yang sah, yang berasal dari dana bagi hasil UWTO yang pada APBD Murni Tahun 2004 diterima sebesar Rp. 11.000.000.000 (Sebelas milyar rupiah), dan pada Tahun 2005 diprediksi tidak diperoleh lagi. Selain itu juga Dana Perimbangan bagi hasil migas dalam APBD Tahun 2004 sebesar 81.000.000.000,- (Delapan puluh satu milyar rupiah) pada RAPBD Tahun 2005 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sebesar 18.000.000.000,- (Delapan belas milyar rupiah) turun sebesar 77,78 %. Penerimaan dari sektor PPh Pasal 21 turun sebesar Rp. 320.000.000,- (Tiga ratus dua puluh juta rupiah) turun sebesar 1,32 % dari tahun sebelumnya.

Pendapatan per kapita merupakan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di Kota Batam setelah dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Batam. Kondisi PDRB tersebut dapat dijadikan sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi Kota Batam dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan seperti sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata dan sektor alih kapal.

Tabel 5.9
PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita
Kota Batam, 1998 – 2003 (Juta rupiah)

Rincian	Berlaku	Konstan
1	2	3
I. PDRB Per Kapita		
1998	17,94	8,39
1999	18,23	8,10
2000	15,03	6,45
2001	14,86	6,11
2002	15,20	5,84
2003	17,15	6,37
II. Pendapatan Regional Per Kapita		
1998	16,66	7,79
1999	16,94	7,52
2000	13,96	5,66
2001	13,81	5,68
2002	14,12	5,42
2003	15,94	5,91

Sumber : BPS Kota Batam, 2004

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat perbandingan PDRB Per Kapita dengan Pendapatan Regional Per Kapita yang cukup signifikan sehingga potensi-potensi untuk menaikkan PDRB Per Kapita dan Pendapatan Regional Per Kapita melalui sektor unggulan di Kota Batam sangat dimungkinkan yang pada gilirannya akan bermuara pada peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Batam.

Proposisi kedua yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah Kota Batam adalah strategi pengembangan konsep otonomi daerah secara komprehensif dan terencana melalui pemberdayaan potensi dan kemampuan aparat birokrat dan *stakeholders* terutama yang berkaitan langsung dalam penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan Kota Batam mampu mengantisipasi

perubahan-perubahan sumber-sumber pembiayaan pembangunan di Kota Batam. Hal ini menunjukkan bahwa proposisi kedua juga diterima sehingga strategi pengembangan konsep otonomi daerah yang mendukung kondusufitas investasi sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan sektor lainnya perlu dipertahankan dan dikembangkan menjadi salah satu indikator utama dalam mengundang minat investasi internasional di Kota Batam.

Tabel 5.10
Pengaruh Pertumbuhan Dan Migrasi Terhadap Pendapatan

Tahun	Pertumbuhan Alami (X1)	Migrasi (X2)	Jumlah Penduduk	Kesejahteraan Masyarakat (Y)		
				Pendapatan Perkapita (Y1)	Tk Pendidikan (Y2)	Tk Kesehatan (Y3)
1992	-	-	95.800	3,87	-	-
1993	2.094	9.706	107.600	4,09	7,22	12,78
1994	2.472	12.928	123.000	4,76	7,38	10,32
1995	2.701	20.513	146.214	5,61	7,94	9,90
1996	2.248	31.355	162.477	5,87	7,99	9,08
1997	2.509	48.999	196.080	6,97	8,01	12,32
1998	2.721	8.962	247.588	7,79	8,32	12,07
1999	5.672	86.600	254.745	7,52	8,72	10,43
2000	4.358	99.470	266.428	5,66	8,94	12,30
2001	4.690	59.933	358.700	5,68	9,24	11,78
2002	3.396	19.404	462.528	5,42	9,975	12,80
2003	2.490	10.220	527.151	5,91	10,97	9,10

Sumber : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Batam, 2004
Dinas Pendidikan Kota Batam, 2004.
Dinas Kesehatan Kota Batam
Biro Pusat Statistik Kota Batam, 2004

5.7. Hasil analisis regresi setiap variabel.

Hasil pengukuran terhadap dimensi-dimensi atau variabel indikator yang dapat membentuk suatu model dengan nilai tertentu menunjukkan tingkat signifikansi atau besarnya pengaruh satu variabel yang diukur terhadap variabel lainnya yang terukur. Adapun faktor hubungan tersebut secara berturut-turut disajikan sebagai berikut:

5.7.1 Faktor Pengaruh Pertumbuhan Alami terhadap kesejahteraan masyarakat

Untuk melakukan uji statistik dengan analisis regresi linear maka data yang harus disediakan merupakan data *time series*. Data tersebut diambil dari data-data yang ada di instansi yang berwenang serta data yang bersifat prediktif. Untuk angka yang bersifat prediktif dengan menggunakan asumsi logika berfikir yang rasional terhadap kebenaran data dimaksud. Selain itu angka tersebut diambil dengan menggunakan hubungan yang logis terhadap data yang sudah ada sebelumnya.

Dari hasil analisis regresi linier antara variabel pertumbuhan alami terhadap pendapatan masyarakat dapat dilihat kecenderungan tertentu serta hubungan pengaruh antar variabel.

Untuk melihat hubungan pertumbuhan alami dengan tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dalam model di bawah ini :

$$\text{Log Pert. Alami} = -10346,7 + 0,011 \text{ Log Kesejahteraan} \dots\dots\dots(1)$$

$$(18,701)^*$$

$$R^2 = 0,978$$

$$F \text{ hit} = 175,090^*$$

Model tersebut diatas menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan angka tingkat kesejahteraan masyarakat sebesar 1 %, maka pertumbuhan alami di Kota Batam akan meningkat sebesar 0,011%. Pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan alami signifikan pada $\alpha = 5 \%$. Model ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Batam berdampak pada pertumbuhan alami yang diukur dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat tersebut. Dengan melihat hasil analisis ini, maka hipotesis pertama bahwa pertumbuhan penduduk alami berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Batam terbukti.

5.7.2. Faktor Migrasi terhadap kesejahteraan masyarakat

Untuk melihat tingkat signifikansi pertumbuhan migrasi terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada model berikut :

$$\text{Log Migrasi} = - 10346,7 + 0,988 \text{ Log Kesejahteraan} \dots\dots\dots(2)$$

$$(18,701)^*$$

$$R^2 = 0,978$$

$$F \text{ hit} = 175,09^*$$

Model kedua tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan migrasi sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,988 %. Secara teoritis peningkatan jumlah

penduduk bersifat kontradiktif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, apabila terjadi kenaikan pada jumlah penduduk dari sektor migrasi maka sebaliknya pendapatan masyarakat akan mengalami penurunan. Tidak signifikannya migrasi terhadap pendapatan masyarakat dapat dimaklumi karena sebagian besar angka migrasi datang secara eksodus dan tidak beraturan. Pengaruh kenaikan atau penurunan pendapatan masyarakat Kota Batam yang diakibatkan oleh jumlah penduduk migrasi menunjukkan adanya tingkat signifikansi perubahan jumlah penduduk terhadap pendapatan masyarakat di Kota Batam. Dengan hasil analisis tersebut di atas maka hipotesis kedua dapat diterima.



BAB 6

PEMBAHASAN

6.1. Dampak Pertumbuhan Penduduk Alami terhadap Kesejahteraan masyarakat Kota Batam

Pertumbuhan Penduduk alami di Kota Batam yang ditentukan oleh indikator jumlah penduduk yang lahir (fertilitas) dan jumlah penduduk yang mati (mortalitas) mempunyai pengaruh yang sangat relevan dengan peningkatan Kesejahteraan masyarakat di Kota Batam. Keterkaitan pertumbuhan penduduk tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas dan keahlian tenaga kerja masyarakat, perlindungan kerja atau penentuan skala prioritas bagi tenaga kerja masyarakat dan peningkatan etos kerja atau budaya kerja masyarakat di Kota Batam. Perluasan kesempatan kerja tersebut dimaksudkan untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam kalangan masyarakat yang pada gilirannya mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat itu sendiri.

Perkembangan investasi di Kota Batam sangat besar dan jauh meninggalkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan berbagai *comparative advantage* serta kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam wilayah ini, sehingga investor menanamkan modalnya dengan tujuan pokok untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan investasinya. Keinginan investor tersebut sangatlah wajar sehingga intervensi Pemerintah dalam penyediaan tenaga kerja tanpa mengganggu minat

investasi tadi sangat dibutuhkan oleh kalangan masyarakat miskin dengan berbagai kekurangan mereka baik dalam kemampuan dan kapasitas kerja yang memerlukan kebijakan-kebijakan tertentu.

Untuk melakukan uji statistik dengan analisis regresi linear maka data yang harus disediakan merupakan data *time series* dimana data tersebut dapat kita ambil dari data-data yang ada di instansi yang berwenang serta data yang bersifat prediktif. Untuk angka yang bersifat prediktif kita menggunakan asumsi logika berfikir yang rasional terhadap kebenaran data dimaksud. Selain itu angka tersebut diambil dengan menggunkan hubungan yang logis terhadap data yang sudah ada sebelumnya.

Variabel yang diajukan sebagai indikator pertumbuhan penduduk alami adalah jumlah kelahiran, jumlah penduduk, jumlah pernikahan, jumlah perceraian dan jumlah kematian.

Pada model (1) pada bab sebelumnya dapat dilihat hubungan pertumbuhan alami dengan tingkat Kesejahteraan masyarakat yang menunjukkan bahwa setiap terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1 %, maka Kesejahteraan masyarakat di Kota Batam akan meningkat sebesar 11,533 %. Pengaruh pertumbuhan penduduk alami terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat signifikan pada $\alpha = 5 \%$. Model ini menunjukkan bahwa pertumbuhan alami berdampak pada penyediaan lapangan kerja baru yang akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkat

kesejahteraan masyarakat. Dengan melihat hasil analisis ini, maka hipotesis pertama bahwa pertumbuhan alami berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam terbukti.

6.2. Pertumbuhan penduduk migrasi mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Batam.

Pertumbuhan penduduk Kota Batam di sektor migrasi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup tajam sehingga upaya sinergi dari pihak pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terbentur dengan perubahan angka pertumbuhan migrasi penduduk yang cukup drastis.

Pertumbuhan penduduk migrasi mempunyai banyak prasyarat yang sangat mendasar sehingga pertumbuhan penduduk Kota Batam secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh angka migrasi tersebut. Jumlah penduduk yang datang ke Kota Batam dengan berbagai tujuan sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat kota Batam. Salah satunya adalah jumlah penduduk yang datang dengan tujuan mencari pekerjaan untuk sementara akan menambah jumlah penduduk dengan kategori pengangguran sehingga secara makro akan menambah beban perekonomian daerah. Kebijakan Pemerintah Kota Batam untuk meminimalisasi jumlah pendatang secara selektif sangat signifikan untuk mengurangi jumlah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan.

Hubungan dan tingkat signifikansi pertumbuhan penduduk dari sektor migrasi terhadap Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada model (2) yang menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan investasi sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan Kesejahteraan di Kota Batam sebesar 19,146%. Angka kenaikan Kesejahteraan tersebut memperlihatkan bahwa jumlah penduduk migrasi yang masuk ke Batam didominasi oleh pekerja di berbagai sektor unggulan yang ada di Kota Batam. Sektor tersebut mempekerjakan penduduk yang siap pakai yang didominasi oleh penduduk yang berasal dari migrasi dimaksud.

6.3. Dampak Pertambahan Penduduk terhadap tingkat Kesejahteraan penduduk

Pertumbuhan penduduk Kota Batam yang cukup tinggi sangat mempengaruhi rata-rata pendapatan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan. Dalam penelitian ini upaya peningkatan Kesejahteraan masyarakat diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. Selain itu aspek lainnya dari sisi kebijakan Pemerintah untuk memfasilitasi proporsi APBD dalam pemberdayaan masyarakat, serta konsistensi pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 70,2 persen responden mengatakan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya dominan dipengaruhi oleh pertumbuhan migrasi penduduk yang cukup tinggi sehingga dapat dilihat dari tingkat daya beli masyarakat itu sendiri kemudian ditopang dengan kebijakan pemerintah yang berpihak

kepada masyarakat miskin. Peningkatan daya beli masyarakat di yakini oleh responden akan meningkat apabila upaya pengentasan kemiskinan tersebut sudah diawali dari sikap dan perilaku si miskin untuk mau dan mampu keluar dari segala keterbatasannya dan keterbelakangannya. Perluasan kesempatan kerja di Kota Batam memiliki kompleksitas masalah yang sangat rumit. Pola rekrutment karyawan yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan mengutamakan tenaga kerja luar wilayah Kota Batam yang akan di berikan pelatihan sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai. Pemerintah sebagai pihak yang berpengaruh dalam pola rekrutmen tenaga kerja dimaksud mempunyai peluang dalam rekrutmen tenaga-tenaga kerja yang berasal dari kalangan masyarakat miskin di Kota Batam.

Untuk mengetahui hubungan antara peningkatan Kesejahteraan masyarakat dengan jumlah masyarakat miskin yang menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1%, maka tingkat Kesejahteraan masyarakat akan turun sebesar 1,169 %. Dengan melihat hasil analisis ini, maka rekomendasi yang sangat penting menjadi catatan Pemerintah Kota Batam adalah pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan sehingga berbagai kebijakan terhadap kependudukan dapat mengakomodasi hasil penelitian ini.

BAB 7

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Pertumbuhan penduduk Kota Batam yang terdiri dari pertumbuhan alami dan migrasi penduduk setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup tajam sehingga mobilitas penduduk di Kota Batam sangat mempengaruhi rata-rata tingkat pendapatan masyarakat di Kota Batam.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat pada uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan penduduk alami terhadap rata-rata tingkat pendapatan masyarakat menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 1 %, maka rata-rata kenaikan pendapatan masyarakat di Kota Batam akan meningkat sebesar 0,5 %. Pengaruh pertumbuhan alami terhadap rata-rata tingkat pendapatan signifikan pada $\alpha = 5$ %. Model ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi berdampak pada penyediaan lapangan kerja baru. Dengan melihat hasil analisis ini, maka hipotesis pertama bahwa perkembangan investasi berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja di Kota Batam terbukti.

Model kedua menunjukkan bahwa setiap terjadi penambahan penduduk sebesar 1%, maka pendapatan masyarakat akan turun sebesar 1,169 %. Model ini dikaitkan dengan ketersediaan lapangan kerja melalui investasi di Kota Batam. Dengan melihat hasil analisis ini, maka hipotesis yang kedua bahwa

pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap rata-rata pendapatan masyarakat di Kota Batam terbukti.

7.2. Saran

Setelah melihat pengaruh yang dibuktikan dengan uji statistik tersebut diatas maka disarankan berbagai hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh penyediaan lapangan kerja bagi mereka mampu menunjang kenaikan pendapatan masyarakat sehingga perlu keterpaduan program pengendalian penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja di Kota Batam.
2. Pertumbuhan penduduk juga sepatutnya diimbangi oleh pertumbuhan investasi yang mampu memberikan multiplier efek terhadap upaya peningkatan penghasilan penduduk migrasi yang jumlahnya sangat tinggi di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, 2001, *Otonomi Daerah : Kaya Teori Lemah Praktik*, Dalam Teguh Yuwono (Ed.), "*Manajemen Otonomi Daerah; Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*", Clogapps Diponegoro University. Semarang.
- Bacal, Robert, 2001, *Performance Manajemen : Memberdayakan Karyawan, Meningkatkan Kinerja Melalui Umpan Balik, Mengukur Kinerja*, Gramedia, Jakarta
- Herawati, Nunik Retno, 2001, *Manajemen Pelayanan Publik. Dalam Teguh Yuwono. Editor. "Manajemen Otonomi Daerah; Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru"*, Clogapps Diponegoro University. Semarang.
- Kaho, Josef Riwu, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang tata cara administrasi kependudukan Kota Batam.
- Purwoko, 2001, *Pembangunan Daerah Dalam Konteks Pembangunan Nasional*, Dalam Teguh Yuwono. Editor. "*Manajemen Otonomi Daerah; Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*", Clogapps Diponegoro University. Semarang.
- Riduan, 2002, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Samego, Indria. 2002, *Masalah Good Governance di dalam Sistem Pemerintahan Daerah : Agenda Tersisa di tengah Pro-Kontra Revisi UU Pemerintahan Daerah*, Jurnal Demokrasi dan HAM. Vo. 2. No. 2. Juni – September 2002. Jakarta.
- Samanu. 2003, *Validitas dan Realibilitas Instrumen*. Makalah tidak diterbitkan. Lembaga Penelitian Unair, Surabaya.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- Sondakh, Lucky W., 2003., *Globalisasi dan Desentralisasi ; Perspektif Ekonomi Lokal*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M.P., 1998, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi keenam. (Alih bahasa oleh Haris Munandar). Penerbit Airlangga. Jakarta.
- Undang-undang Otonomi Daerah beserta Juklak, 2000, Arloka, Jakarta.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Usman, Husaini dan R. Purnomo Setiady Akbar, 1995, *Pengantar Statistika*, Sinar Grafika Offset. Jakarta.

Zadjuli, Suroso Imam. 2001, *Prospek dan Kendala Ekonomi Indonesia Tahun 2001*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.



LAMPIRAN : Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kesejahteraan	19461.82	15963.062	11
Pertumbuhan Alami	37099.09	32362.755	11
Migrasi	259319.18	138161.263	11

Correlations

		PAD	Pertumbuhan Alami	Migrasi
Pearson Correlation	PAD	1.000	.036	.989
	Pertumbuhan Alami	.036	1.000	.026
	Migrasi	.989	.026	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.458	.000
	Pertumbuhan Alami	.458	.	.470
	Migrasi	.000	.470	.
N	PAD	11	11	11
	Pertumbuhan Alami	11	11	11
	Migrasi	11	11	11

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Migrasi, Pertumbuhan Alami		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.989 ^a	.978	.972	2667.258	.978	175.090	2	8	.000

a. Predictors: (Constant), Migrasi, Pertumbuhan Alami

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.49E+09	2	1245639712	175.090	.000 ^a
	Residual	56914140	8	7114267.540		
	Total	2.55E+09	10			

a. Predictors: (Constant), Migrasi, Pertumbuhan Alami

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10346.7	2002.814		-5.166	.001
	Pertumbuhan Alami	.005	.026	.011	.200	.847
	Migrasi	.114	.006	.988	18.701	.000

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran : Peta Teori

PETA TEORI

No	Nama / Tahun	Judul	Paradigma Konsep/Hipotesisi/ Landasarn teori
1	Goldberg (1998:201)	Implementasi Desentralisasi	Prasayarat agar tujuan tersebut dapat dipenuhi melalui implementasi: 1.Mengembalikan hak-hak sipil dan kebebasan sipil; 2.Pemerintah Pusat harus memberikan hak pengelolaan dana pada Pemerintah Daerah; 3.Preferensi idealitik dari Pemerintah Pusat atas sektor pembangunan harus fleksibel dengan preferensi dari Pemerintah Daerah; 4.Pemerintah Pusat harus dapat mengembangkan standar-standar baru yang dapat memperkuat tanpa mendikte; 5.Berusaha memberikan kekuasaan lebih dahulu kepada rakyat
2	Fadillah Putra (2001: 49)	Devolusi	Desentralisasi kedalam 2 (dua) pengertian Devolusi, yang sering juga disebut sebagai Desentralisasi Politik, yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada badan perwakilan yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

No	Nama / Tahun	Judul	Paradigma Konsep/Hipotesisi/ Landasarn teori
3	David Osborne dan Ted Gaebler (1996 : 43)	<i>Reinventing Government</i> , yang dilanjutkan dengan konsep <i>Banishing Bureaucracy</i>	Berkaitan dengan konteks pembenahan lembaga-lembaga tersebut, telah menggagas suatu konsep tentang pelaksanaan pemerintahan yang mampu menjawab tantangan modernisasi dan perkembangan tuntutan masyarakat. Gagasan terakhir ini merupakan suatu metodologi tentang penggunaan strategi perubahan yang mendasar pada seluruh level organisasi pemerintahan. Strategi tersebut terdiri dari 5 (lima) aspek penting, yaitu yang menyangkut tujuan, insentif, akuntabilitas, kekuasaan dan kultur
4	Henry Teune (1999 : 115)	Demokratisasi	Desentralisasi politik dan pemberdayaan masyarakat daerah. Secara teoritis bahkan mengatakan bahwa demokratisasi hanya akan akurat tercapai bila itu diartikan sebagai pemberdayaan lembaga-lembaga negara agar sesuai dengan fungsinya. Dalam perspektif itu, maka problem Pemerintahan Daerah adalah salah satu kajian dalam pembenahan di tingkat lembaga, sebagai bagian dari implementasi pembenahan relasi antara negara dan rakyat.